



**LAPORAN PRAKTIKUM LABORATORIUM
PROGRAM STUDI PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL**

**PEMBIMBING:
Dr. Decky Irianti, M.P.**

**Oleh:
Vira Eliza
NRP 20.03.017**

**POLITEKNIK KESEJAHTERAAN SOSIAL
BANDUNG
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : LAPORAN PRAKTIKUM
LABORATORIUM PROGRAM STUDI
PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nama Mahasiswa : Vira Eliza

NRP : 20.03.017


Program : Program Studi Perlindungan dan
Pemberdayaan Sosial Program
Sarjana Terapan

Pembimbing:



Dr. Decky Irianti, M.P

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial
Program Sarjana Terapan
Politeknik Kesejahteraan Sosial**



Lina Favourita Sutiaputri, Ph. D

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya praktikan dapat menyelesaikan kegiatan Praktikum Laboratorium dan penulisan laporan akhir Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Laporan Praktikum Laboratorium ini disusun berdasarkan dari hasil kegiatan identifikasi dan analisis yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023 – 15 April 2023 dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pelaksanaan kegiatan Praktikum Laboratorium ini praktikan lakukan di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Praktikan mampu menyelesaikan laporan praktikum ini tentunya dibantu dan didukung oleh berbagai pihak. Maka dari itu, praktikan ingin mengucapkan terima kasih baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Dr. Marjuki, M.Sc selaku Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
2. Lina Favourita Sutiaputri, Ph.D selaku Ketua Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
3. Dra. Atirista Nainggolan, MP selaku Kepala Laboratorium Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
4. Dr. Decky Irianti, MP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan baik secara akademik, administrasi, dan dukungan dalam proses pelaksanaan praktikum;
5. Pemandu dalam pembekalan profil lulusan yang telah memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai setiap profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial;
6. Teman-teman kelompok 6 Praktikum Laboratorium yang telah bekerjasama dan saling membantu serta mendukung satu sama lain selama kegiatan Praktikum Laboratorium berlangsung;
7. Orang tua dan keluarga atas dukungan, semangat, dan doa untuk kesuksesan praktikan selama menjalani Praktikum Laboratorium.

Praktikan juga menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu praktikan mengharapkan adanya komentar dan saran yang sifatnya membangun terhadap laporan Praktikum Laboratorium ini.

Bandung, 16 April 2023

Praktikan

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Praktikum	2
1) Tujuan Praktikum.....	2
2) Manfaat Praktikum.....	2
C. Waktu dan Lokasi Praktikum	3
D. Proses Praktikum	4
1. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial	6
2. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial	8
3. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial.....	9
4. Peningkatan Kompetensi Analis Penataan Lingkungan Sosial.....	11
5. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana	12
E. Sistematika Laporan.....	14
II. PRAKTIKUM LABORATORIUM.....	15
A. Profil Analis Jaminan Sosial	15
1. Gambaran Umum Masalah	15
2. Tinjauan Konsep	16
a. Perlindungan Sosial	16
b. Jaminan Sosial	17
c. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK).....	17
3. Asesmen	22
a. Identifikasi Masalah.....	22
1) Penyebab Masalah.....	23
2) Dampak Masalah.....	24
3) Fokus Masalah	24
4) Analisis Pohon Masalah.....	25

4.	Rencana Intervensi	26
a.	Latar Belakang	26
b.	Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	26
c.	Bentuk Kegiatan dan Program	26
d.	Sistem Partisipan	27
e.	Metode dan Teknik	27
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan.....	28
g.	Analisis Kelayakan Program.....	31
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah.....	32
i.	Indikator Keberhasilan	33
B.	Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial	33
1.	Gambaran Umum Masalah	33
2.	Tinjauan Konsep	35
a.	Pengertian Bantuan Sosial	35
b.	Tujuan Dana Bantuan Sosial.....	35
c.	Jenis Bantuan Sosial	36
d.	Sumber Dana Bantuan Sosial	36
e.	Penggalangan Dana.....	37
f.	Dasar Hukum Penggalangan Dana	37
g.	Posyandu.....	38
3.	Asesmen	39
a.	Identifikasi Masalah.....	39
1)	Penyebab Masalah.....	40
2)	Dampak Masalah.....	41
3)	Fokus Masalah	41
4)	Analisis Pohon Masalah.....	42
b.	Identifikasi Kebutuhan.....	42
c.	Identifikasi Potensi dan Sumber	42
4.	Rencana Intervensi	43
a.	Latar Belakang	43
b.	Tujuan Umum dan Khusus	43
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	44

d.	Sistem Partisipan.....	44
e.	Metode dan Teknik	45
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan	45
g.	Analisis Kelayakan Program	47
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah	48
i.	Indikator Keberhasilan.....	49
C.	Profil Analisis Pemberdayaan Sosial	50
1.	Gambaran Umum Masalah	50
2.	Tinjauan Konsep	51
a.	Pemberdayaan Sosial	51
b.	Aras Pemberdayaan Sosial.....	51
c.	Dasar Hukum Pemberdayaan Sosial.....	52
d.	Kelompok Rentan	52
e.	Program Kang Pisman	52
f.	Konsep Zero Waste.....	53
3.	Asesmen	53
a.	Identifikasi Masalah.....	53
a.	Penyebab Masalah.....	55
b.	Dampak Masalah.....	56
c.	Fokus Masalah	56
d.	Analisis Pohon Masalah.....	57
b.	Identifikasi Kebutuhan.....	57
c.	Identifikasi Potensi dan Sumber	57
4.	Rencana Intervensi	58
a.	Latar Belakang	58
b.	Tujuan Umum dan khusus	58
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	59
d.	Sistem Partisipan.....	59
e.	Metode dan Teknik	59
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan	60
g.	Analisis Kelayakan Program	63
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah	64

i.	Indikator Keberhasilan.....	65
D.	Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial.....	66
1.	Gambaran Umum Masalah.....	66
2.	Tinjauan Konsep.....	67
a.	Definisi Lingkungan Sosial.....	67
b.	Penataan Lingkungan Sosial.....	67
c.	Pedagang Kaki Lima.....	67
d.	Ketentuan Hukum Mengenai Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung.....	68
3.	Asesmen.....	69
a.	Identifikasi Masalah.....	69
1)	Penyebab Masalah.....	71
2)	Dampak Masalah.....	71
3)	Fokus Masalah.....	72
4)	Analisis Pohon Masalah.....	72
b.	Identifikasi Kebutuhan.....	73
c.	Identifikasi Potensi dan Sumber.....	73
4.	Rencana Intervensi.....	74
a.	Latar Belakang.....	74
b.	Tujuan Umum dan Khusus.....	74
c.	Bentuk Kegiatan dan Program.....	75
d.	Sistem Partisipan.....	75
e.	Metode dan Teknik.....	75
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan.....	76
g.	Analisis Kelayakan Program.....	78
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah.....	79
i.	Indikator Keberhasilan.....	81
E.	Profil Analisis Penanggulangan Bencana.....	81
1.	Gambaran Umum Masalah.....	81
2.	Tinjauan Konsep.....	82
a.	Definisi Bencana.....	82
b.	Manajemen Penanggulangan Bencana.....	83
c.	Bencana Banjir.....	84

d.	Jenis-Jenis Banjir	84
e.	Faktor Penyebab Banjir	85
3.	Asesmen	86
1)	Penyebab Masalah.....	87
2)	Dampak Masalah.....	88
3)	Fokus Masalah	88
4)	Analisis Pohon Masalah.....	89
4.	Rencana Intervensi	90
a.	Latar Belakang	90
b.	Tujuan Umum dan Khusus	91
c.	Bentuk Kegiatan dan Program	91
d.	Sistem Partisipan.....	91
e.	Metode dan Teknik	92
f.	Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan	93
g.	Analisis Kelayakan Program	95
h.	Jadwal dan Langkah-Langkah	96
i.	Indikator Keberhasilan.....	98
III.	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Rekomendasi	100
1.	Untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial	100
2.	Untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	101
	DAFTAR PUSTAKA	102
	LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil Transect Walk Kelurahan Sukapura	22
Tabel 2. 2 Sistem Partisipan Analis Jaminan Sosial	27
Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Biaya Analis Jaminan Sosial	29
Tabel 2. 4 Alat Analis Jaminan Sosial	30
Tabel 2. 5 Analisis SWOT Analis Jaminan Sosial.....	31
Tabel 2. 6 Jadwal Kegiatan Analis Jaminan Sosial.....	33
Tabel 2. 7 Tabel Identifikasi Masalah Analis Sumber Dana Bantuan Sosial	39
Tabel 2. 8 Sistem Partisipan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial	44
Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Biaya Analis Sumber Dana Bansos	45
Tabel 2. 10 Alat Sumber Dana Bansos	46
Tabel 2. 11 Analisis SWOT Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	47
Tabel 2. 12 Jadwal Kegiatan Analis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	49
Tabel 2. 13 Identifikasi Masalah Analis Pemberdayaan Sosial	54
Tabel 2. 14 Sistem Partisipan Analis Pemberdayaan Sosial	59
Tabel 2. 15 Jadwal Kegiatan Analis Pemberdayaan Sosial	61
Tabel 2. 16 Alat Analis Pemberdayaan Sosial	62
Tabel 2. 17 Analisis SWOT Analis Pemberdayaan Sosial	63
Tabel 2. 18 Jadwal Kegiatan Analis Pemberdayaan Sosial	65
Tabel 2. 19 Identifikasi Masalah Analis Penataan Lingkungan.....	70
Tabel 2. 20 Sistem Partisipan Analis Penataan Lingkungan.....	75
Tabel 2. 21 Rencana Anggaran Biaya Analis Penataan Lingkungan.....	77
Tabel 2. 22 Alat Penataan Lingkungan	77
Tabel 2. 23 Analisis SWOT Analis Penataan Lingkungan	78
Tabel 2. 24 Jadwal Kegiatan Analis Penataan Lingkungan	80
Tabel 2. 25 Identifikasi Masalah Analis Penanggulangan Bencana	86
Tabel 2. 26 Sistem Partisipan Analis Penanggulangan Bencana	92
Tabel 2. 27 Rencana Anggaran Biaya Analis Penanggulangan Bencana	93
Tabel 2. 28 Alat Analis Penanggulangan Bencana	94
Tabel 2. 29 Analisis SWOT Analis Penanggulangan Bencana.....	95
Tabel 2. 30 Jadwal Kegiatan Analis Penanggulangan Bencana.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pembekalan Analisis Penanggulangan Bencana.....	4
Gambar 2 Pelepasan Mahasiswa Praktikum ke Dosen Pembimbing.....	5
Gambar 3 Pelepasan Mahasiswa ke Kelurahan Sukapura	6
Gambar 4 Bimbingan Profil Analisis Jaminan Sosial	7
Gambar 5 Bimbingan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial.....	9
Gambar 6 Pembekalan Pemberdayaan Sosial	11
Gambar 7 Bimbingan Isu Penataan Lingkungan	12
Gambar 8 Wawancara Bersama Sekertaris Lurah	23
Gambar 9 Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial.....	25
Gambar 10 Wawancara bersama Ketua Posyandu RW 05	40
Gambar 11 Analisis Pohon Masalah Sumber Dana Bantuan Sosial	42
Gambar 12 Wawancara bersama Kelompok PKK RW 10	55
Gambar 13 Analisis Pohon Masalah Pemberdayaan Sosial.....	57
Gambar 14 Lokasi PKL RW 13 Dekat Sungai/Kali	71
Gambar 15 Analisis Pohon Masalah Penataan Lingkungan	72
Gambar 16 Sampah di Kali sekitar PKL.....	73
Gambar 17 Kondisi Aliran Gorong-Gorong RW 10.....	82
Gambar 18 Wawancara Bersama Ketua RW 10	86
Gambar 19 Pelaksanaan MPA di RW 10.....	87
Gambar 20 Analisis Pohon Masalah Penanggulangan Bencana.....	89
Gambar 21 Koordinasi dengan Pihak Kelurahan Sukapura.....	104
Gambar 22 Kunjungan ke Posyandu RW 05	104
Gambar 23 Wawancara kepada Ketua RW 03.....	104
Gambar 24 Wawancara dengan Ibu PKK RW 10.....	104
Gambar 25 Kondisi air got di RW 10	104
Gambar 26 Wawancara dengan Ketua Guber Sukapura.....	104

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu proses pendidikan tentunya tidak hanya berbicara tentang kemampuan akademik, namun juga keterampilan berupa *soft skill* yang diperoleh dari pembelajaran di luar kelas untuk menunjang peningkatan kompetensi seorang akademisi. Demikian pula di Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung yang tidak hanya memberikan pembelajaran dalam kelas (*classroom teaching*), tetapi juga melalui praktikum laboratorium (*laboratory practicum*) indoor dan outdoor. Kegiatan praktikum ini menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan-keterampilan dasar dalam proses intervensi pekerjaan sosial. Sehingga, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melakukan praktik di aras mikro, meso, dan makro, baik untuk bekerja dengan individu, kelompok, masyarakat, maupun organisasi sosial. Praktikum laboratorium ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas di masyarakat ataupun organisasi sosial untuk memahami berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Kegiatan praktikum laboratorium ini dilaksanakan dengan melakukan asesmen langsung kepada masyarakat setempat dan mengumpulkan berbagai data sekunder sebagai pendukung fenomena permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sehingga kesejahteraan sosial ini merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bersama bagi seluruh warga negara dalam pemenuhan kebutuhan.

Praktikum Laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial menjadi suatu unsur penting dalam membentuk profil lulusan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yaitu sebagai Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Melalui praktikum laboratorium, mahasiswa diharapkan mampu meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam praktik intervensi pekerjaan sosial mulai dari proses awal hingga pengakhiran melalui aktivitas di dalam praktikum laboratorium Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Selain itu, praktikum ini juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan

keterampilan dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial dalam mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Karena kegiatan praktikum laboratorium berfokus pada penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan khusus proses intervensi pekerjaan sosial dalam menangani berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat sekitar dan organisasi sosial, sehingga dalam hal ini mahasiswa turut andil dalam membantu perwujudan kesejahteraan sosial di Indonesia serta sebagai salah satu bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bentuk implementasi ilmu pengetahuan selama masa pendidikan dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam menangani permasalahan sosial.

B. Tujuan dan Manfaat Praktikum

Tujuan dan manfaat dari pelaksanaan Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang dilakukan oleh praktikan adalah sebagai berikut:

1) Tujuan Praktikum

Praktikum laboratorium bertujuan agar mahasiswa memiliki:

- a. Sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, perbedaan agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- c. Kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Kemampuan untuk mempraktikkan keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- e. Memiliki keterampilan dalam melakukan proses intervensi pekerjaan sosial meliputi tahapan :
 - 1) Pendekatan Awal
 - 2) Asesmen
 - 3) Perencanaan Intervensi

2) Manfaat Praktikum

Bagi Mahasiswa:

- a. Terbentuknya sikap mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasar agama, moral, dan etika; menghargai keanekaragaman budaya, agama, kepercayaan, dan pendapat, serta temuan orisinal orang lain; memiliki kepekaan sosial, kepedulian, serta kerjasama dalam masyarakat dan lingkungan; taat hukum, jujur, teliti dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian perlindungan dan pemberdayaan sosial secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- b. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- c. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan prinsip dan etika pekerjaan sosial dalam menerapkan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- d. Meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam mempraktikkan keterampilan-keterampilan metode dan teknik praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- e. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya secara nyata dalam praktik perlindungan dan pemberdayaan sosial.
- f. Mahasiswa memiliki keterampilan praktik pekerjaan sosial dalam perlindungan dan pemberdayaan sosial yang meliputi tahapan :
 - a. Pendekatan awal
 - b. Asesmen
 - c. Rencana Intervensi

Bagi Lembaga:

- a. Meningkatnya kualitas kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- b. Sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kurikulum Program Sarjana Terapan Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung

C. Waktu dan Lokasi Praktikum

Lokasi praktikum berada di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat. Waktu pelaksanaan Praktikum Laboratorium sesuai dengan tahapan proses terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Pra Lapangan

- a. Pembekalan : 25 Januari – 3 Februari 2023
- b. Pelepasan praktikan : 8 Februari 2023
- 2. Lapangan (Indoor) : 8 Februari – 15 April 2023
- 3. Pasca Lapangan
 - a. Bimbingan laporan : 16 – 26 April 2023
 - b. Pendaftaran ujian : 27 – 29 April 2023
 - c. Ujian Lisan Praktikum : 1 – 2 Mei 2023
 - d. Perbaikan dan penyerahan laporan: 3 – 10 Mei 2023

D. Proses Praktikum

Proses Praktikum Laboratorium dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengakhiran.

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap pra lapangan yang dilaksanakan untuk menyiapkan praktikan dan dosen pembimbing praktikum dalam memahami kegiatan praktikum laboratorium. Tahap pra lapangan terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pembekalan Umum

- Pembekalan umum dilaksanakan dengan pemberian materi tentang perlindungan dan jaminan sosial oleh nara sumber yang terdiri dari
- 1) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI
 - 2) Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI

b. Bimbingan Pra Lapangan oleh Dosen Pembimbing Praktikum

- 1) Review tentang materi pembekalan umum dan penugasan melalui Google Classroom
- 2) Bimbingan teori/konsep dan keterampilan yang akan diterapkan



Gambar 1 Pembekalan Analisis Penanggulangan Bencana

- 3) Melakukan Praktik, demonstrasi, role playing tentang kegiatan dan teknologi Perlindungan dan pemberdayaan sosial dengan menggunakan data sekunder, dalam hal :
 - a) Mengenal populasi kelompok sasaran (population target group) dan lingkungan sosialnya.
 - b) Mengidentifikasi dan memahami program-program : Sistem Jaminan Sosial, Sumber Dana Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penataan Lingkungan Sosial, Penanggulangan Bencana
 - c) Mempelajari isu-isu masalah perlindungan dan pemberdayaan sosial yang terkait dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
 - d) Mengidentifikasi kebijakan dan program/kegiatan penanganan masalah Perlindungan dan Pemberdayaan sosial sesuai dengan 5 (lima) profil Prodi Lindayasos.
 - 4) Membuat matriks rencana kerja dan desain teknologi yang sesuai dengan kegiatan praktikum laboratorium.
- c. Serah Terima Praktikan dari Prodi kepada Dosen Pembimbing Praktikum
- Serah terima praktikan, dilaksanakan secara luring di Lapangan Poltekesos Bandung dilakukan oleh Kaprodi Lindayasos kepada Dosen Poltekesos Bandung yang ditunjuk sebagai dosen pembimbing praktikum.



Gambar 2 Pelepasan Mahasiswa Praktikum ke Dosen Pembimbing

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap lapangan dilaksanakan dalam lima sesi sesuai profil lulusan Prodi Lindayasos yaitu praktik sebagai Analis Jaminan Sosial,

Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana Setiap sesi dilaksanakan selama 14 hari kalender, dengan rician kegiatan sebagai berikut:



Gambar 3 Pelepasan Mahasiswa ke Kelurahan Sukapura

1. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial

- a. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE selaku Perencana Ahli Muda Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas yang dilaksanakan pada Kamis, 2 Februari 2023. Membahas tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia, yang meliputi:
 - a) Kebijakan dan struktur jaminan sosial.
 - b) Program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.
 - c) Kelembagaan utama penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.
 - d) Kebijakan dan penguatan pelaksanaan sistem jaminan sosial.
 - e) Strategi dan target jaminan sosial dalam RKP 2023.
 - f) Karakteristik masyarakat yang menerima bantuan sosial di sektor formal dan informal.
 - g) Tantangan program jaminan sosial di Indonesia: Pekerja informal di Indonesia.
 - h) Potensi kontribusi lulusan jaminan sosial.
- b. Peningkatan Kompetensi Analis Jaminan Sosial oleh dosen Prodi Lindayasos, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Jaminan Sosial, sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan
 - i. Mengetahui konsep teoritis kebutuhan dasar manusia.

- ii. Memahami konsep masalah sosial dan masalah kesejahteraan sosial.
 - iii. Mengetahui konsep perlindungan dan jaminan sosial.
 - iv. Mengetahui konsep standar praktik pekerjaan sosial.
- b) Keterampilan
- i. Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - ii. Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan dan jaminan sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal
 - iii. Mampu menganalisis dan menyusun program bantuan sosial
 - iv. Mampu menganalisis dan menyusun program advokasi sosial
 - v. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian akses bantuan hukum
- c) Praktik Analis Jaminan Sosial, meliputi:
- i. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah dalam pelaksanaan Jaminan Sosial.
 - ii. Melakukan asesmen dengan menggunakan data sekunder.
 - iii. Menyusun rencana intervensi sesuai dengan kasus/permasalahan yang dipilih oleh praktikan.
 - iv. Menyusun laporan praktik analis jaminan sosial.



Gambar 4 Bimbingan Profil Analis Jaminan Sosial

2. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

- a. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh Tonton Heriyanto selaku CSR Manager PT.AAPC Indonesia yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Februari 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analis Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dalam implementasi sumber dana bantuan sosial.
 - b) Model sumber dana bantuan sosial yang digunakan
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
 - d) Merancang program sumber dana bantuan sosial
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program sumber dana bantuan sosial.
 - f) Dimensi tujuan pembangunan berkelanjutan.
 - g) Manajemen sumber dana bantuan sosial
 - h) Komponen dalam membangun jaringan
- b. Peningkatan Kompetensi Analis Sumber Dana Bantuan Sosial oleh dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial, sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan
 - i. Menguasai konsep bantuan sosial dan jenisnya
 - ii. Menguasai konsep sumber dana bantuan sosial
 - iii. Menguasai konsep penggalangan dana dan prinsip-prinsip penggalangan dana bantuan sosial
 - iv. Menguasai konsep perencanaan dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
 - v. Menguasai konsep pelaksanaan dan kebijakan penggalangan sumber dana bantuan sosial
 - vi. Menguasai konsep monitoring dan evaluasi dalam penggalangan sumber dana bantuan sosial
 - b) Keterampilan
 - i. Mampu menganalisis dan menyusun program perencanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 - ii. Mampu dalam menganalisis dan menyusun program pelaksanaan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 - iii. Mampu menganalisis dan menyusun program monitoring dan evaluasi dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial

- iv. Mampu menganalisis dan menyusun sistem pelaporan dalam penggalangan dana dan pengelolaan dana bantuan sosial
 - v. Mampu menganalisis dan menyusun sistem informasi dan komunikasi dalam penggalangan dana pengelolaan dana bantuan sosial
- c) Praktik Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, meliputi:
- i. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam pengelolaan sumber dana bantuan sosial
 - ii. Melakukan asesmen, dengan menggunakan data sekunder
 - iii. Menyusun rencana intervensi
 - iv. Menyusun laporan praktik analisis sumber dana bantuan sosial



Gambar 5 Bimbingan Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

3. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial

- a. Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial oleh Samsul Maarif selaku Projek Manajer Yayasan Usaha Mulia Kab. Cianjur yang dilaksanakan pada Rabu, 8 Maret 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analisis Pemberdayaan Sosial yang meliputi:
- a) Berbagai isu dan implementasi pemberdayaan sosial
 - b) Model pemberdayaan sosial yang digunakan
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam pemberdayaan sosial
 - d) Merancang program pemberdayaan sosial
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program pemberdayaan sosial
 - f) Stakeholder terkait program pemberdayaan sosial

- b. Peningkatan Kompetensi Analis Pemberdayaan Sosial oleh dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Pemberdayaan Sosial, sebagai berikut:
- a) Pengetahuan
 - i. Menguasai konsep kebutuhan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemberdayaan sosial
 - ii. Menguasai konsep dan teknologi pemberdayaan sosial
 - iii. Menguasai konsep sumber daya penyelenggaraan sosial dalam pemberdayaan sosial
 - iv. Menguasai konsep supervisi dalam program pemberdayaan sosial
 - v. Menguasai konsep pendampingan sosial dan penguatan kelembagaan sosial dalam pemberdayaan sosial
 - vi. Menguasai konsep keserasian sosial dan pemasaran hasil usaha dalam pemberdayaan sosial
 - b) Keterampilan
 - i. Mampu mengidentifikasi permasalahan dan sumber daya yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
 - ii. Mampu menganalisis dan menyusun program penumbuhan kesadaran dan pemberian motivasi dalam pemberdayaan sosial
 - iii. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberian keterampilan dalam pemberdayaan sosial
 - iv. Mampu menganalisis dan menyusun program penguatan kelembagaan dalam masyarakat dalam pemberdayaan sosial
 - v. Mampu melaksanakan program pendampingan sosial untuk pemberdayaan sosial
 - vi. Mampu menganalisis dan menyusun program kemitraan dan penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial
 - vii. Mampu melaksanakan pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
 - viii. Mampu melaksanakan peningkatan akses pemasaran hasil usaha
 - ix. Mampu melaksanakan supervisi dan advokasi sosial dalam pemberdayaan sosial
 - x. Mampu menganalisis dan menyusun program keserasian sosial dan bimbingan lanjut dalam pemberdayaan sosial
 - c) Praktik Analis Pemberdayaan Sosial, meliputi:

- i. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial
- ii. Melakukan asesmen, dengan menggunakan data sekunder
- iii. Menyusun rencana intervensi
- iv. Menyusun laporan praktik analisis pemberdayaan sosial



Gambar 6 Pembekalan Pemberdayaan Sosial

4. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial

- a. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh Ade Reno, AKS, MSW selaku Deputi 1 CEO, Islamic Relief Indonesia yang dilaksanakan pada Kamis, 23 Maret 2023. Membahas tentang Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial yang meliputi:
 - a) Berbagai isu dalam mengelola penataan lingkungan sosial
 - b) Model penataan lingkungan sosial yang digunakan
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penataan lingkungan sosial
 - d) Merancang program penataan lingkungan sosial
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penataan lingkungan sosial
 - f) Stakeholder terkait program Penataan Lingkungan Sosial
- b. Peningkatan Kompetensi Analisis Penataan Lingkungan Sosial oleh dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, sebagai berikut:
 - a) Pengetahuan
 - i. Menguasai Konsep ekologi manusia dalam lingkungan sosial
 - ii. Menguasai Konsep krisis lingkungan, konflik sosial, dan urbanisasi

- iii. Menguasai Konsep degradasi lingkungan dan bencana alam
 - iv. Menguasai Konsep adaptasi ekologi manusia
 - v. Menguasai Konsep interaksisosial-ekologi dalam suatu sistem sosial komunitas dan ekosistem
 - vi. Menguasai Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
 - vii. Menguasai Konsep praktik pekerjaan sosial dalam penataan lingkungan sosial
- b) Keterampilan
- i. Mampu menganalisis hubungan permasalahan lingkungan dengan munculnya masalah sosial
 - ii. Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam
 - iii. Mampu menganalisis dan menyusun program penataan lingkungan sosial dalam peningkatan keberfungsian individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat
- c) Praktik Analisis Penataan Lingkungan Sosial, meliputi:
- i. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/masalah-masalah dalam penataan lingkungan sosial
 - ii. Melakukan asesmen, dengan menggunakan data sekunder
 - iii. Menyusun rencana intervensi
 - iv. Menyusun laporan praktik analisis penataan lingkungan sosial



Gambar 7 Bimbingan Isu Penataan Lingkungan

- 5. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana**
- a. Peningkatan Kompetensi Analisis Penanggulangan Bencana oleh Mohd Robi Amri selaku Perencana Ahli Madya BNPB Jakarta yang dilaksanakan pada Rabu, 5 April 2023. Membahas tentang

Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana yang meliputi:

- a) Berbagai isu dalam penanggulangan bencana
 - b) Model penanggulangan bencana yang digunakan
 - c) Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam penanggulangan bencana
 - d) Merancang program penanggulangan bencana
 - e) Melakukan analisis kelayakan rancangan program penanggulangan bencana
 - f) Stakeholder terkait program penanggulangan bencana
- b. Peningkatan Kompetensi Analis Penanggulangan Bencana oleh dosen Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, dengan materi mengacu pada kompetensi profil Analis Penanggulangan Bencana, sebagai berikut:
- a) Pengetahuan
 - i. Menguasai Konsep bencana alam dan non alam serta jenis-jenisnya
 - ii. Menguasai Konsep masalah bencana dan sistem penanggulangan bencana
 - iii. Menguasai Konsep mitigasi bencana, dan pengurangan risiko bencana.
 - iv. Menguasai Konsep perlindungan korban bencana pada saat status darurat bencana
 - v. Menguasai Konsep standar minimum pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
 - b) Keterampilan
 - i. Mampu melaksanakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk pengurangan risiko bencana
 - ii. Mampu menganalisis dan menyusun program perlindungan korban pada saat status darurat bencana
 - iii. Mampu menganalisis pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan pengungsi
 - iv. Mampu menganalisis dan menyusun program pemberdayaan korban bencana pasca bencana
 - v. Mampu menganalisis dan menyusun program pengembangan masyarakat resilien terhadap bencana
 - c) Praktik Analis Penanggulangan Bencana, meliputi:
 - i. Melakukan pendekatan awal untuk mengidentifikasi kasus-kasus/ masalah-masalah dalam penanggulangan bencana
 - ii. Melakukan Assesmen, dengan menggunakan data sekunder
 - iii. Menyusun Rencana Intervensi
 - iv. Menyusun laporan praktik penanggulangan bencana

3) Tahap Pasca Lapangan

Tahap pasca lapangan merupakan tahap pengakhiran dalam Praktikum Laboratorium. Dalam tahap ini terdapat finalisasi penyusunan laporan akhir praktikum, ujian lisan praktikum, serta perbaikan dan penyerahan laporan. Dimana mahasiswa akan mempresentasikan hasil praktikum selama di lapangan sebagai bentuk pertanggungjawaban praktikan dalam menerapkan teknologi pekerjaan sosial di lapangan.

E. Sistematika Laporan

Output dari kegiatan Praktikum Laboratorium ini adalah berupa laporan akhir praktikum. Laporan akhir praktikum dibuat dan diperiksa pada setiap tahap perkembangan praktikum yang mengacu pada kolom hasil-hasil yang diharapkan pada bagian tugas praktikan.

Berikut ini sistematika laporan akhir individu Praktikum Laboratorium Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Tahun 2023 dimana sistematika laporan ini akan digunakan oleh praktikan sebagai panduan dalam menyusun laporan akhir praktikum.

- a. **BAB I PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, tujuan dan manfaat praktikum, waktu dan lokasi praktikum, proses praktikum, dan sistematika laporan.
- b. **BAB II PRAKTIKUM LABORATORIUM**, yang berisi tentang profil Analisis Jaminan Sosial, Profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Profil Analisis Pemberdayaan Sosial, Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Profil Analisis Penanggulangan Bencana. Masing-masing profil membahas mengenai gambaran umum masalah, tinjauan konsep/teori yang relevan dengan kasus/masalah kesejahteraan sosial yang dipilih, hasil asesmen, dan rencana intervensi.
- c. **BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**, memuat kesimpulan akhir praktikum dan rekomendasi yang ditujukan kepada Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

II. PRAKTIKUM LABORATORIUM

A. Profil Analisis Jaminan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, negara memiliki tanggung jawab dalam peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sehingga perlu adanya program perlindungan sosial yang terencana, terarah, berorientasi jangka panjang, dan berkelanjutan. Terlebih lagi dalam hal jaminan kesehatan yang menjadi hak mendasar untuk terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pasal 28 H ayat (1) menegaskan bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya pada ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004)

Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial meluncurkan suatu program jaminan sosial di bidang kesehatan melalui program PBI-JK yaitu bantuan sosial Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang diluncurkan sejak 3 November 2014 melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS).

PBI-JK merupakan bentuk program jaminan kesehatan dimana Kementerian Sosial bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraannya. Sehingga masyarakat miskin dan rentan juga mampu memperoleh jaminan kesehatan yang ditanggung secara gratis oleh negara.

Sejak diluncurkan, program KIS ini mendapatkan respon positif dari masyarakat terutama masyarakat kurang mampu karena mereka memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dari tahun ke tahun juga terdapat peningkatan jumlah penerima KIS baik itu dari kategori mandiri maupun PBI. Pelaksanaan KIS secara berkelanjutan dimulai sejak tahun 2014 di 18 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun ke-9 pelaksanaan program KIS, cakupan kepesertaan telah mencapai 226 juta jiwa atau sekitar 84% dari total jumlah penduduk di Indonesia.

Pelaksanaan program PBI-JK dalam bentuk KIS PBI termasuk program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses

layanan kesehatan. Dimana peserta KIS PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah dan masyarakat bisa mengakses pelayanan KIS PBI di puskesmas dan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, masyarakat yang akan menjadi peserta KIS PBI akan didata terlebih dahulu oleh pihak RT yang selanjutnya data ini akan diteruskan untuk masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima program PBI-JK dalam bentuk PBI KIS ini. Seperti yang terjadi di Kelurahan Sukapura, tepatnya di RW 03, masih banyak masyarakat yang tergolong kategori miskin dan rentan belum memiliki PBI KIS sehingga mereka kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Meskipun terdapat program pemerintah melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bidang kesehatan untuk mengcover dan menunjang sementara layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, namun hal ini juga tidak efektif karena akan memakan waktu yang lama untuk memperoleh fasilitas layanan kesehatan dibandingkan bagi masyarakat miskin yang telah memiliki PBI KIS.

2. Tinjauan Konsep

a. Perlindungan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Menurut International Labour Organization (ILO) perlindungan sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan. (International Labour Organization, 2012).

Dinyatakan oleh Asian Development Bank (ADB) yang dikutip oleh Habibullah, menjelaskan bahwa:

“Perlindungan sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Perlindungan sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin. (Habibullah, 2017: 3)

Sehingga dengan adanya perlindungan sosial, masyarakat miskin juga mampu berdaya dan terlindungi dari risiko-risiko kerentanan.

b. Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Menurut ILO (1952 : 102), jaminan sosial didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat untuk para anggotanya melalui seperangkat instrument public, terhadap kesulitan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh karena terhentinya atau turunnya penghasilan diakibatkan oleh sakit, hamil, kecelakaan kerja, pengangguran, cacat, hari tua, dan kematian.

Menurut UU No 40 Tahun 2004 jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. UU 11 tahun 2009 Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Jaminan Sosial merupakan bagian dari Perlindungan Sosial , yaitu menurut Asian Development Bank (ADB), Perlindungan sosial adalah Sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan.

c. Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

1) Definisi Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK), merupakan program Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.

PBI-JK merupakan salah satu program jaminan sosial dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam menunjang layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Penerima jaminan sosial PBI-JK ini merupakan masyarakat kurang mampu yang kesulitan membayar iuran bulanan dari program BPJS

Kesehatan. Dimana masyarakat yang menjadi peserta program PBI-JK harus terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Mekanisme penyalurannya dimana masyarakat yang menerima bantuan iuran PBI-KIS akan mendapatkan bantuan senilai Rp 42.000 per bulan untuk setiap individu yang nantinya akan langsung masuk ke iuran bulanan BPJS Kesehatan sehingga bantuan ini tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang seperti halnya bantuan sosial yang lain, namun langsung masuk ke iuran BPJS Kesehatan milik individu yang menjadi peserta PBI-KIS.

(Panduan Layanan BPJS Kesehatan JKN-KIS, 2020:12)

2) Dasar Hukum PBI-JK

Adapun dasar hukum program jaminan sosial PBI-JK yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Proses pencairan bansos PBI JK dilakukan oleh Kemensos kepada peserta program BPJS Kesehatan dalam bentuk jaminan kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 disebutkan, syarat penerima bansos PBI-JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.

(Flora Maria, 2022)

3) Tujuan PBI-JK

Adapun tujuan dari program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tergolong kategori miskin untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis dan menunjang pemenuhan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui pembayaran iuran yang ditanggung oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan. (Jaminan Kesehatan Nasional, 2016)

4) Manfaat Penerima PBI-JK

Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan Manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Paket manfaat yang diterima dalam program JKN ini adalah komprehensif sesuai kebutuhan medis. Dengan demikian pelayanan yang diberikan bersifat paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) tidak dipengaruhi oleh besarnya biaya premi bagi peserta. Promotif dan preventif yang diberikan dalam konteks upaya kesehatan perorangan (personal care). Manfaat pelayanan promotif dan preventif meliputi pemberian pelayanan:

- 1) Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 2) Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri Pertusis Tetanus dan HepatitisB (DPTHB), Polio, dan Campak.
- 3) Keluarga berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Vaksin untuk imunisasi dasar dan alat kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- 4) Skrining kesehatan, diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.

Meskipun manfaat yang dijamin dalam JKN bersifat komprehensif namun masih ada yang dibatasi, yaitu kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset). Sedangkan yang tidak dijamin meliputi:

- a. Tidak sesuai prosedur
- b. Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
- c. Pelayanan bertujuan kosmetik
- d. General check up, pengobatan alternatif
- e. Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Saat Bencana
- g. Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh Diri/Narkoba
(Buku Pegangan Sosialisasi JKN, 2020:30)

5) Kriteria Penerima PBI-JK

Menurut Kementerian Kesehatan terdapat beberapa kriteria sebagai penerima PBI-JK yaitu:

1. Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
2. Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik (BPS) diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu.
3. Data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dirinci menurut provinsi dan kabupaten/kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan
4. Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI Jaminan Kesehatan sebagai peserta program Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

6) Syarat Penerima PBI-JK

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, syarat untuk menerima PBI-JK yaitu:

1. Terdaftar di DTKS.
2. Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
3. Sudah menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK).
4. Sudah menyerahkan fotokopi E-KTP (KTP Elektronik).
5. Menyerahkan fotokopi KIS yang dimiliki (dalam satu Kartu Keluarga).
6. Pendaftaran difasilitasi oleh Kementerian Sosial

7) Hak dan Kewajiban Peserta PBI-JK

1) Hak Peserta PBI-JK

1. Mendapatkan kartu peserta berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bukti sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Memperoleh manfaat dan informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
4. Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis ke kantor BPJS Kesehatan.

2) Kewajiban Peserta PBI-JK

1. Mendaftarkan diri sebagai peserta PBI-JK dan terdaftar di DTKS melalui perangkat daerah setempat seperti RT/RW.
2. Melaporkan perubahan data peserta, baik karena pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat.
3. Menjaga kartu KIS PBI agar tidak rusak, hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
4. Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.
(Panduan Layanan BPJS Kesehatan JKN-KIS, 2020:26)

8) Mekanisme Distribusi Program

Seperti yang diketahui bersama, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam pemenuhan jaminan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat. Dinas Sosial membantu pemerintah daerah untuk pelaksanaan program tersebut dalam hal verifikasi data calon penerima manfaat dan pendistribusian Kartu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Adapun selanjutnya persyaratan administrasi kepesertaan akan disesuaikan dengan ketentuan masing-masing jenis kepesertaan.

Khusus untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI, penetapan peserta mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan PBI hanya dapat dilakukan melalui pendataan Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Barulah setelah itu kepesertaan BPJS Kesehatan PBI akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

Dengan kata lain, masyarakat yang ingin mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI harus terlebih dahulu terdaftar dalam DTKS. Barulah kemudian yang bersangkutan bisa meminta pihak Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk didaftarkan sebagai peserta PBI.

Mengingat penjaminan layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan PBI mengacu pada DTKS, maka apabila terdapat masyarakat yang belum terdaftar dalam DTKS sebagai PBI, yang bersangkutan dapat dilaporkan kepada Dinas Sosial untuk didaftarkan dalam DTKS PBI yang aktif di bulan berikutnya.

Distribusi KIS-PBI saat ini ditangani oleh pihak ketiga yaitu PT. Pos Indonesia, jasa ekspedisi lainnya seperti TIKI JNE serta mitra BPJS Kesehatan. Khusus untuk memantau distribusinya KIS – PBI dan memastikan bahwa kartu sudah sampai ke peserta, BPJS Kesehatan pun membentuk Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI. BPJS Kesehatan telah membuat posko baik ditingkat kantor pusat, regional, cabang maupun kantor layanan operasional kabupaten dan kota. Tujuan dibuatnya posko tersebut selain memantau proses distribusi juga untuk memfasilitasi pengaduan dari masyarakat. Posko Pemantauan dan Penanganan Pengaduan Distribusi KIS-PBI nantinya juga akan berfungsi sebagai sentra informasi bagi masyarakat untuk mengetahui status kepesertaan KIS-nya. Selain itu juga untuk memperoleh informasi mengenai langkah yang harus diambil untuk mendaftarkan diri sebagai anggota JKN KIS non PBI.

Tidak hanya itu, posko ini juga dapat melayani pengaduan atau pelaporan seputar distribusi KIS PBI. Misalnya seperti pembaharuan data seperti domisili, laporan bahwa peserta sudah meninggal atau meningkatnya kondisi perekonomian peserta sehingga sudah tidak termasuk dalam kriteria peserta KIS PBI lagi.

Posko akan ditempatkan di kantor pusat, kantor divisi regional, kantor cabang dan kantor layanan kabupaten atau kota BPJS Kesehatan. Agar dapat memperoleh solusi cepat masyarakat juga dapat menghubungi hotline kantor pusat BPJS Kesehatan di nomor

08119104999 atau layangkan saja aduan ke alamat e-mail lapor.pusat@bpjs-kesehatan.go.id.

(Panduan Layanan BPJS Kesehatan JKN-KIS, 2020)

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Kelurahan Sukapura merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Dengan luas wilayah sekitar 108,72 Ha yang terbagi kedalam 15 RW dan 109 RT. Total jumlah penduduk Kelurahan Sukapura sebanyak 27.858 jiwa pada akhir Bulan Desember 2016. Mobilitas penduduk di Kelurahan Sukapura sangatlah cepat mengingat aksesibilitas dan letak geografis yang memiliki potensi industri dan banyak potensi ekonomi di bidang perdagangan, sehingga Kelurahan Sukapura pun tak luput dari permasalahan sosial. Dimana kepadatan penduduk di Kelurahan Sukapura berjalan beriringan dengan timbulnya permasalahan sosial disana.

Pada tanggal 8 Februari 2023 kelompok praktikan Kelurahan Sukapura yang dibagi lagi dalam 4 kelompok melakukan *transect walk* dengan tujuan untuk melakukan pemetaan sosial suatu wilayah di Kelurahan Sukapura secara keseluruhan. Dari kegiatan *transect walk* tersebut di dapatkan hal-hal berikut:

Tabel 2. 1 Hasil Transect Walk Kelurahan Sukapura

RW	Keterangan
08	Banyak perumahan, kondisi lingkungan cukup baik, rumah penduduk di dalam gang banyak berdekatan.
09	Terdapat PT. PINDAD, banyak masyarakat membuka warung kecil, terdapat gorong-gorong yang kurang terawat, terdapat pos kamling.
10	Terdapat perumahan TNI AD dan rata-rata rumah penduduk bagus.
11	Terdapat komplek TNI AD, rumah penduduk rata-rata menengah keatas, lingkungan tertata dengan baik, terdapat satu SMA.

Selanjutnya pada hari ke-2 tanggal 9 Februari 2023 praktikan melakukan kegiatan wawancara kepada kelompok k sasaran penerima manfaat (KPM), berdasarkan hasil dari *transect walk* tersebut praktikan memilih RW 09 dan RW 10 untuk dilakukan wawancara bersama ketua RW dengan tujuan mengetahui permasalahan sosial yang terjadi di RW yang bersangkutan.

Dilanjutkan hari ke-3 tanggal 10 Februari 2023 kelompok praktikan mengerucutkan lagi RW yang dipilih untuk di asesmen lebih lanjut. Dari 15 RW yang ada kelompok praktikan memilih empat RW sebagai lokasi praktikum berdasarkan hasil *transect walk*, wawancara, dan juga rekomendasi dari kepala bidang bidang kesejahteraan sosial Kelurahan Sukapura.

Salah satu permasalahan sosial di Kelurahan Sukapura dalam penyelenggaraan jaminan sosial yaitu di bidang kesehatan. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemenuhan kesehatan merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara kepada masyarakat. Terlebih lagi masyarakat yang tergolong fakir miskin, dimana mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan. Sehingga pemerintah mengeluarkan program PBI-JK melalui kartu PBI KIS yaitu program yang bertujuan untuk mengcover biaya pengobatan dan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang terdaftar di DTKS sehingga mereka bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis.

Namun, fakta di lapangan masih banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu PBI KIS sebagai salah satu syarat untuk mengakses pelayanan kesehatan di instansi layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga hal ini menjadi problematika yang meresahkan masyarakat, terlebih masyarakat yang masuk kategori lanjut usia dan fakir miskin khususnya ibu rumah tangga yang kesulitan dalam mengurus administrasi layanan kesehatan karena tidak memiliki kartu PBI KIS. Meskipun terdapat alternatif yaitu dengan adanya program pemerintah berupa pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)



Gambar 8 Wawancara Bersama Sekertaris Lurah

bagi masyarakat miskin di Kelurahan Sukapura, namun hal ini tetap menjadi permasalahan karena masyarakat yang seharusnya bisa dengan mudah mengakses layanan kesehatan, dalam hal ini mereka harus mengurus terlebih dahulu ke pihak kelurahan dengan alur administrasi yang cukup sulit mereka pahami untuk memperoleh kartu PBI KIS sebagai syarat resmi kepesertaan BPJS Kesehatan program PBI-JK.

1) Penyebab Masalah

Dari hasil Analisis Pohon Masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi dalam pembuatan PBI KIS kurang maksimal
Penerima manfaat PBI KIS kurang memahami terkait alur administrasi dalam pembuatan PBI KIS karena kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pendaftaran kepesertaan PBI KIS. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih menganggap bahwa kartu PBI KIS belum terlalu bermanfaat sehingga tidak mendaftarkan diri sebagai peserta PBI KIS.
 - 2) Kader BPJS Kesehatan hanya satu di Kelurahan Sukapura
Hal ini menyebabkan masyarakat kecil kesulitan untuk menyampaikan keluhan yang mereka rasakan karena sumber informasi resmi dari pihak BPJS Kesehatan hanya satu orang di setiap Kelurahan.
 - 3) Kesalahan dalam validasi dan verifikasi data
Sebagian masyarakat yang sudah memiliki kartu PBI KIS malah menerima lagi kartu tersebut, sedangkan masyarakat yang sudah beberapa kali mengajukan tidak menerima. Hal ini terjadi karena adanya data ganda yang terverifikasi oleh sistem sehingga terjadi ketidakselarasan antara data di BPJS Kesehatan dengan di lapangan.
- 2) Dampak Masalah
- Berdasarkan Analisis Pohon Masalah, dapat disimpulkan beberapa dampak masalah yang ditimbulkan, yaitu:
- 1) Masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan
Apabila tidak memiliki PBI KIS atau kartu PBI KIS nya tidak aktif, maka masyarakat miskin akan sulit ketika mengakses layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan karena syarat utama untuk memperoleh layanan kesehatan gratis harus memiliki kartu KIS.
 - 2) Ketidaktahuan masyarakat terkait manfaat PBI KIS
Karena kurangnya sosialisasi maka masyarakat yang belum memiliki PBI KIS tidak akan paham terkait manfaat dari PBI KIS yang mampu mengcover biaya layanan kesehatan ketika mereka jatuh sakit di suatu saat.
 - 3) Masyarakat sulit untuk menyampaikan keluhan dan menanyakan informasi terkait PBI KIS karena hanya memiliki satu kader di setiap kelurahan.
- 3) Fokus Masalah
- Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu sebagian masyarakat lanjut usia dan ibu rumah tangga yang tergolong fakir miskin di RW 03, kartu PBI KIS nya tidak aktif bahkan ada yang tidak memiliki kartu PBI KIS. Fokus masalah ini ditentukan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan bersama

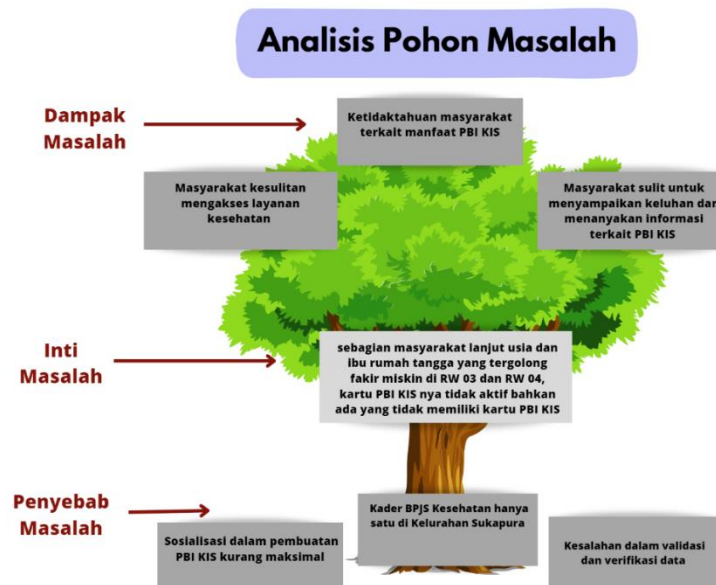
kelompok sasaran penerima manfaat dan tokoh masyarakat (Ketua RW, Ketua Kelompok PKK) yang ada di RW 03 Kelurahan Sukapura

4) Analisis Pohon Masalah

Berikut merupakan analisis pohon masalah yang dapat digambarkan dari hasil asesmen yang telah dilakukan:

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka



Gambar 9 Analisis Pohon Masalah Jaminan Sosial

dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu:

- 1) Kebutuhan akan peningkatan pengetahuan atau informasi alur administrasi PBI KIS.
- 2) Memberikan pemahaman kepada KPM mengenai manfaat PBI KIS.
- 3) Memberikan pendampingan kepada KPM sebagai kelompok penerima manfaat untuk mengaktifkan kartu PBI KIS dan mendaftarkan diri sebagai peserta PBI KIS.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut merupakan potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Sukapura:

- 1) Dinas Sosial Kota Bandung
Dinas Sosial dalam pelaksanaan rencana intervensi berperan sebagai fasilitator dan *support system* dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 2) Kader BPJS Kesehatan Kelurahan Sukapura
Kader BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan rencana intervensi berperan sebagai edukator dalam memberikan informasi kepada masyarakat

terkait alur administrasi dan manfaat PBI KIS serta sebagai broker antara pihak Kelurahan Sukapura dengan BPJS Kesehatan.

3) Kelompok PKK

Kelompok PKK dalam pelaksanaan rencana intervensi berperan sebagai edukator dan pendamping terkait pendampingan KPM dalam pembuatan kartu PBI KIS.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Pemahaman dan informasi mengenai seluruh hal yang berkaitan dengan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dalam bentuk PBI KIS merupakan tanggung jawab seluruh sumber daya manusia yang bersangkutan dalam penyelenggaraan jaminan sosial di bidang kesehatan mulai dari struktur paling bawah hingga ke atas.

Khususnya penyelenggara kesejahteraan sosial di bidang kesehatan ini tentu harus memiliki kepekaan terhadap problematika yang terjadi di masyarakat mengenai kartu PBI KIS. PBI KIS merupakan realisasi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi jaminan sosial di bidang kesehatan sehingga informasi terkait program ini mulai dari pendataan, pendaftaran, hingga kepesertaan juga harus jelas dan sampai ke seluruh lapisan masyarakat sehingga tidak terjadi mis informasi atau mis komunikasi.

Sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat yang masuk kategori PMKS dan terdata dalam DTKS terkait tujuan dan manfaat dari PBI KIS ini sehingga mereka bisa mengakses layanan kesehatan secara gratis. Maka perlu adanya komitmen dan kerja sama antar berbagai stakeholder terkait dalam merealisasikan rencana intervensi ini agar bisa direalisasikan di masyarakat khususnya Kelurahan Sukapura.

b. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan KPM terkait kartu Penerima Bantuan Iuran Kartu Indonesia Sehat (PBI KIS) dari program Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini, antara lain:

- 1) Mendorong KPM yang belum memiliki PBI KIS untuk mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI KIS.
- 2) Tidak ada lagi terjadinya mis informasi di kalangan KPM terkait alur administrasi dan tujuan dari PBI KIS.
- 3) Membantu KPM yang kesulitan dalam mengakses layanan PBI KIS karena kartunya tidak aktif atau bahkan belum memiliki kartu PBI KIS.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagian masyarakat lanjut usia dan ibu rumah tangga yang tergolong fakir

miskin di RW 03 dan RW 04, kartu PBI KIS nya tidak aktif bahkan ada yang tidak memiliki kartu PBI KIS yaitu dengan memberikan pendampingan langsung ke lapangan kepada KPM yang tidak memiliki PBI KIS oleh kelompok PKK yang bekerja sama dengan RT dan RW setempat untuk melakukan pendataan warga yang belum memperoleh PBI KIS serta yang kartu PBI KIS tidak aktif agar bisa melakukan aktivasi kembali. Serta memberikan edukasi kepada KPM yang belum memahami manfaat dan alur administrasi kepesertaan PBI KIS melalui sosialisasi.

Program yang akan dilaksanakan yaitu “Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Kartu PBI KIS Dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan”.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Sistem Partisipan Analisis Jaminan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	Masyarakat RW 03 dan RW 04 yang belum memiliki PBI KIS dan KIS tidak aktif
4.	Support System	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. BPJS Kesehatan
5.	Controlling System	Dinas Sosial Kota Bandung
6.	Implementing System	1 Kelompok PKK 2 Kader BPJS Kesehatan
7.	Target System	Masyarakat RW 03 dan RW 04 yang belum memiliki PBI KIS dan KIS tidak aktif
8.	Action System	1. Kelompok PKK 2. Kader BPJS Kesehatan

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat adalah Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/ Pengembangan Organisasi (*Community Organization/CD*). Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/ Pengembangan Organisasi (*Community Organization/CD*) adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

1) **Penyuluhan Sosial**

Penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2) *Focus Group Discussion* atau Diskusi Kelompok Terfokus

Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci.

Tujuan dari metode itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik.

3) **Monitoring dan Evaluasi**

Monitor merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan baik selama proses kegiatan maupun pada akhir program. Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Program Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Kartu PBI KIS Dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dapat terlaksana dengan anggaran berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Biaya Analisis Jaminan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	100.000,00	100.000,00
	Sound System	2	Unit	-	-
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Doorprize	5	Unit	30.000,00	150.000,00
	Infokus	1	Unit	-	-
	Layar Proyektor	1	Unit	-	-
	Jumlah I				325.000,00
2.	Honorarium				
	Kader BPJS Kesehatan	1	Orang/Jam	500.000,00	500.000,00
	Kasie Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukapura	1	Orang/Jam	500.000,00	500.000,00
	Jumlah II				1.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	30	Box	10.000,00	300.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				400.000,00
	Jumlah Keseluruhan				1.725.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Alat Analis Jaminan Sosial

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor	2	Buah
Proyektor	2	Buah
Meja narasumber	1	Buah
Meja tamu	2	Buah
Sofa tamu	2	Set
Kursi	30	Buah
ATK	1	Paket
Laptop	1	Buah
Banner kegiatan	1	Buah
Sound system	1	Set
Microfone	2	Buah
Kabel roll (terminal)	2	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Analisis SWOT Analisis Jaminan Sosial

Faktor Internal	Strength : 1. Adanya Narasumber yang tepat 2. Kegiatan didukung oleh Pemerintah Daerah 3. KPM terbuka dengan informasi baru 4. KPM mempunyai <i>curiosity</i> yang besar	Weakness : 1. Ada kemungkinan peserta tidak memahami materi yang disampaikan
Faktor Eksternal		
Opportunities : 1. Dapat menambah pengetahuan KPM PBI KIS mengenai kepesertaan 2. Pihak-pihak yang terkait dapat lebih memahami tugas dan kewajibannya	Strategi SO : 1. Melakukan kolaborasi dengan stakeholder terkait 2. Meningkatkan pengetahuan KPM PBI KIS 3. Meningkatkan koordinasi terhadap pelaksanaan pendataan di lapangan	Strategi WO : 1. Penyampaian materi sosialisasi dikemas secara menarik dan menggunakan komunikasi dua arah 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami dan diselingi penggunaan bahasa sunda
Threats : 1. Sulit menemukan waktu yang tepat 2. Rendahnya minat baca	Strategi ST : 1. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan sejak jauh hari 2. Membuat pamflet atau poster dengan kalimat sederhana dan desain yang menarik	Strategi WT : 1. Membuat acara yang efektif dan efisien

Berdasarkan hasil analisis kelayakan Program Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Kartu PBI KIS Dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa KPM PBI KIS terbuka pada informasi baru dan memiliki rasa penasaran yang tinggi. Pemberian sosialisasi yang tepat akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial kesehatan.

Kemudian kegiatan ini juga didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dan Pemerintahan Kelurahan Sukapura. Dinas terkait berperan mengedukasi KPM PBI KIS mengenai alur administrasi dan kepesertaan dalam penyelenggaraan PBI KIS. Hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan, tujuannya agar masyarakat KPM PBI KIS ini bisa memahami dengan mudah alur administrasi untuk membuat PBI KIS.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya satu, adanya kemungkinan peserta yang merupakan KPM PBI KIS tidak memahami materi yang disampaikan. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Kartu PBI KIS Dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan layak dilaksanakan.

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Langkah-Langkah Pelaksanaan

a. Pra Pelaksanaan

- a) Dalam Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Kartu PBI KIS Dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan yang akan dilaksanakan, Praktikan akan mengundang Dinas Sosial Kota Bandung, Pihak Kelurahan Sukapura, Ketua RW 03, dan masyarakat penerima kartu PBI KIS.
- b) Terdapat dua materi yang akan dibawakan dalam kegiatan Sosialisasi ini, yaitu, materi pertama terkait Program PBI-JK dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin. Materi kedua terkait Alur Administrasi dan Kepesertaan PBI KIS.
- c) Narasumber yang menyajikan materi tersebut adalah Kader BPJS Kesehatan dan Kasie Bidang Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukapura.
- d) Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berjalannya kegiatan sosialisasi ini adalah di Aula Kantor Kelurahan Sukapura.

b. Pelaksanaan

- a) Sambutan oleh Lurah Kelurahan Sukapura.
- b) Pembacaan Doa oleh Pekerja Sosial.
- c) Pemberian materi tentang Program PBI-JK dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin.
- d) Pemberian materi tentang alur administrasi dan kepesertaan PBI-KIS.
- e) ISHOMA.
- f) Pendampingan pendataan kepesertaan PBI-KIS
- g) Penutup.

c. Pasca Pelaksanaan

- a) Penyusunan Laporan oleh Pekerja Sosial.
- b) Dokumentasi sebagai Bukti Kegiatan.

c) Monitoring dan Evaluasi

2) Jadwal Kegiatan

Berikut merupakan rancangan pelaksanaan kegiatan program:

Tabel 2. 6 Jadwal Kegiatan Analis Jaminan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	09.00-09.10	Pembukaan	Sie. Acara	Pembukaan oleh Lurah Sukapura
2.	09.10-09.15	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pekerja sosial
3.	09.15-10.45	Pemberian Materi	Sie. Acara	Materi: Program PBI-JK dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan bagi Fakir Miskin Pemateri: Kader BPJS Kesehatan
4.	10.45-12.00	Pemberian Materi	Sie Acara	Materi: Alur Administrasi dan Kepesertaan PBI KIS Pemateri: Kasie Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukapura
5.	12.00-13.00	ISOMA	Sie. Konsumsi	Istirahat, Sholat, dan makan siang
6.	13.00-15.00	Pendampingan Pendataan Kepesertaan PBI KIS	Sie. Acara	-
7.	15.00-15.15	Penutup	Sie. Acara	-

i. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari program ini adalah:

- 1) Sasaran mampu memahami tentang PBI KIS.
- 2) Sasaran mampu memahami alur administrasi kepesertaan PBI KIS.
- 3) Peningkatan rasa tanggung jawab kader BPJS Kesehatan dalam merespon keluhan warga terkait PBI KIS.
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya terdaftar dalam program jaminan kesehatan PBI KIS khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
- 5) Terlaksananya pendataan yang valid bagi KPM yang belum memiliki PBI KIS dan PBI KIS yang tidak aktif untuk diaktivasi kembali.

B. Profil Analis Sumber Dana Bantuan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Di setiap tahunnya, Indonesia telah mengalami penurunan pada Angka Kematian Balita (AKBA), begitupula sejak tahun 2019 hingga 2022.

Meskipun angka kematian balita telah menunjukkan penurunan, ditemukan bahwa anak usia dibawah 5 tahun sangat rentan dengan kematian yang dimana salah satu faktor yang mendasari kerentanan tersebut adalah malnutrisi. Sehingga perlu adanya strategi yang tepat untuk mengurangi permasalahan kesehatan anak dan balita. Salah satunya dengan pemberian makanan tambahan (PMT). PMT merupakan salah satu komponen penting untuk memperbaiki keadaan rawan gizi pada balita.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu usaha kesehatan berbasis masyarakat di Indonesia yang dikembangkan dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita. penyelenggaraan pemberian PMT dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah pendanaan. Karena aspek finansial merupakan suatu hal penting dalam operasional kegiatan dalam suatu pelayanan sosial. Kecukupan pendanaan program secara efektif juga menjadi salah satu hal yang dapat menguatkan implementasi program kesehatan di masyarakat.

Pengelolaan dana posyandu menjadi suatu pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan, termasuk pengelolaan dana kegiatan untuk pemberian makanan tambahan bagi balita. Hal ini dikarenakan posyandu berpotensi untuk mendapatkan berbagai dana bantuan yang bersumber dari Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), maupun berbagai bantuan dari pemerintah daerah. Namun, tidak setiap posyandu mampu untuk memperoleh pendanaan yang sesuai untuk kegiatan operasionalnya. Sehingga perlu adanya inovasi dari kader atau pengurus posyandu dalam pengelolaan sumber dana operasional kegiatan posyandu ini.

Salah satu bentuk inisiatif kelompok kader posyandu RW 05 Kelurahan Sukapura yaitu menyelenggarakan program Dana Sehat untuk menunjang pemerian makanan tambahan (PMT) bagi balita setiap bulannya. Dana Sehat ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk mengumpulkan sumber dana dari swadaya masyarakat di RW 05 untuk mendukung operasional kegiatan posyandu dalam pemberian makanan tambahan bagi balita. Sumbangan yang dikumpulkan dalam bentuk uang yang dibebankan sebanyak Rp. 1000/Kartu Keluarga kepada masyarakat di RW 05 yang dilaksanakan secara bergilir setiap bulannya.

Namun, sayangnya program Dana Sehat ini belum berjalan secara optimal karena ada sebagian masyarakat yang tidak dibebankan dalam pembayaran Dana Sehat ini seperti masyarakat lanjut usia dan masyarakat yang menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sehingga dana yang dikumpulkan belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pemberian makanan tambahan bagi balita. Selain itu, terdapat dana yang sudah terkumpulkan di ketua posyandu periode sebelumnya namun dana tersebut tidak pernah sampai ke pihak posyandu sehingga kegiatan pemberian

makanan tambahan terhambat karena adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh ketua posyandu sebelumnya.

2. Tinjauan Konsep

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Bantuan Sosial menurut Permensos No. 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial adalah Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan /atau rentan terhadap risiko sosial.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Permendagri No. 32 Tahun 2011, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Berdasarkan pengertian bantuan sosial tersebut, yang menjadi tujuan dari pemberian bantuan sosial adalah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

b. Tujuan Dana Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 Tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Pada Pasal 4 ayat (2), disebutkan bahwa Tujuan penggunaan anggaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 2) Perlindungan sosial, yang bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhannya minimal.
- 3) Pemberdayaan sosial, yang merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) Jaminan sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- 5) Penanggulangan kemiskinan, yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/atau

masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- 6) Penanggulangan bencana, yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

c. Jenis Bantuan Sosial

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pada Pasal 15 ayat (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:

- 1) Bantuan Langsung;
- 2) Penyediaan Aksesibilitas; dan
- 3) Penguatan Kelembagaan

d. Sumber Dana Bantuan Sosial

Sumber Dana Bantuan Sosial (SDBS) ada 3 yaitu bersumber dari masyarakat, dana hibah, dan negara antara lain:

- 1) Negara

Pemerintah mengelola bantuan sosial yang bersumber dari pajak melalui APBN/APBD didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melakukan pengumpulan uang dan barang serta pengelolaan pajak undian yang dituangkan dalam bentuk Dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS). Dana bantuan sosial yang bersumber dari Negara melalui Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pajak yang dituangkan dalam APBN/APBD dan UKS. Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari negara antara lain Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan sebagainya.

- 2) Hibah Luar Negeri

Negara melalui Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dapat memperoleh bantuan dari luar negeri dengan skema *Government to Government* (Pemerintah Negara lain kepada pemerintah pusat/daerah), atau *Private to Government* (Swasta/masyarakat/organisasi dari luar negeri kepada pemerintah pusat/daerah), atau skema *Private to Private* (Masyarakat/swasta/organisasi luar negeri kepada swasta/masyarakat/organisasi dalam negeri) Pelaksanaan bantuan sosial dari luar negeri harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: Tidak untuk mendanai terorisme, radikalisme, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan penggunaan bantuan dari luar negeri harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Masyarakat

Sesuai prinsip kesetiakawanan sosial bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial merupakan tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, salah satu wujud peran serta masyarakat yaitu pemberian sumbangan sosial berupa uang atau barang bagi perorangan atau kelompok dengan tujuan agar dana yang terkumpul dapat membantu penanganan permasalahan sosial. Usaha pengumpulan sumbangan sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan. Penggunaan dan pertanggung jawaban sumbangan sosial adalah pertanggungjawaban terhadap sumbangan sosial yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengumpulan uang dan barang baik secara teknis maupun administratif. Sumber dana bantuan sosial yang berasal dari masyarakat antara lain diperoleh dari kedermawanan orang; Lembaga sosial (rumah zakat, rumah yatim, Baznas, kita bisa.com); dana hibah seperti sumbangan (pengumpulan uang dan barang) dan undian (pajak undian berhadiah); dana berdasarkan kearifan lokal (beas perelek, rereongan sarumpi, beas jimpitan, serikat tolong menolong).

e. Penggalangan Dana

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (“PP 29/1980”). Pengumpulan uang atau barang dalam UU 9/1961 memiliki makna yang sama dengan pengumpulan sumbangan yang berarti setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.

f. Dasar Hukum Penggalangan Dana

Dasar hukum penggalangan dana yakni sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
- 2) PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang;
- 3) PP Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin;
- 4) PP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian Sosial;
- 5) Kepmensos Nomor 1/HUK/1955 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam;
- 6) Kepmensos Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat; dan
- 7) Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang.

g. Posyandu

Menurut Depkes RI(2006) Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Besumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Menurut Ismawati, dkk 2010 tujuan penyelenggaraan posandu adalah :

- 1) Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil, melahirkan dan nifas). Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi cukup tinggi, meskipun dari tahun ke tahun sudah dapat diturunkan.
- 2) Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera).
- 3) Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan, kegiatan kesehatan dari Keluarga Berencana (KB) serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
- 4) Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera. Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga sejahtera.
- 5) Menghimpun potensi masyarakat untuk berperan serta secara aktif meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, balita dan keluarga serta mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 137 tahun 2017, jenis sumber dana dalam penyelenggaraan posyandu adalah:

- 1) APBDES: menyatakan jenis sumber dana pembiayaan kegiatan posyandu desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES.
- 2) Iuran bulanan masyarakat dan APBDES: menyatakan jenis sumber dana pembiayaan kegiatan posyandu desa adalah iuran bulanan masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES.
- 3) Iuran bulanan masyarakat: menyatakan jenis sumber dana pembiayaan kegiatan posyandu desa adalah iuran bulanan masyarakat.
- 4) Lainnya: menyatakan jenis sumber dana pembiayaan kegiatan posyandu desa adalah sumber dana lain selain iuran bulanan masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Kelurahan Sukapura merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Dengan luas wilayah sekitar 108,72 Ha yang terbagi kedalam 15 RW dan 109 RT. Total jumlah penduduk Kelurahan Sukapura sebanyak 27.858 jiwa pada akhir Bulan Desember 2016. Mobilitas penduduk di Kelurahan Sukapura sangatlah cepat mengingat aksesibilitas dan letak geografis yang memiliki potensi industri dan banyak potensi ekonomi di bidang perdagangan, sehingga Kelurahan Sukapura pun tak luput dari permasalahan sosial. Dimana kepadatan penduduk di Kelurahan Sukapura berjalan beriringan dengan timbulnya permasalahan sosial disana.

Pada tanggal 2 Maret 2023 praktikan melakukan wawancara mendalam dengan kelompok PKK RW 05 untuk mengidentifikasi permasalahan terkait sumber dana bantuan sosial di RW 05 Kelurahan Sukapura. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan beberapa permasalahan sosial terkait sumber dana bantuan sosial sebagaimana berikut:

Tabel 2. 7 Tabel Identifikasi Masalah Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Permasalahan	Kelompok
Kurangnya pendanaan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak dan balita	Kelompok Posyandu
Penyelewengan Dana Sehat oleh ketua posyandu periode sebelumnya	
Tidak adanya sponsor tetap dalam mendukung pendanaan program posyandu	
Program UP2K belum berjalan secara optimal	Kelompok PKK
Keterbatasan pengelolaan dana oleh pengurus PKK dalam mengembangkan program UP2K	

Berdasarkan hasil wawancara bersama kelompok PKK praktikan mengambil kasus terkait permasalahan sumber dana bantuan sosial pada kelompok atau kader posyandu. Selanjutnya pada 4 Maret 2023, praktikan kembali melakukan wawancara dengan ketua posyandu terkait permasalahan pendanaan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk anak dan balita. Diperoleh informasi bahwa kelompok posyandu merasa kesulitan karena pernah terjadi penyelewengan program Dana Sehat untuk pemberian makanan tambahan sehingga terjadi pergantian kepengurusan posyandu sejak Bulan Desember lalu dan Program Dana Sehat dimulai dari awal karena sempat terhambat.

Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemberian makanan tambahan bagi anak dan balita di Posyandu merupakan salah satu pendukung untuk mengurangi angka terjadinya stunting, sehingga perlu

adanya kolaborasi antara pengurus posyandu dengan masyarakat RW 05. Terlebih karena pernah terjadi penyelewengan Dana Sehat yang merupakan kumpulan dana dari swadaya masyarakat sehingga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap kelompok posyandu berkurang.

1) Penyebab Masalah

Dari hasil identifikasi masalah, dapat disimpulkan beberapa penyebab masalah sebagai berikut:

- 1) Dana yang didapatkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan PMT
Dana yang tidak mencukupi untuk pemenuhan pemberian makanan tambahan membuat makanan tambahan yang diberikan oleh kelompok posyandu kepada anak dan balita kurang bervariasi sehingga mengurangi minat anak dan balita dalam mengikuti kegiatan posyandu setiap bulannya.
- 2) Tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam pemberian Dana Sehat
Hal ini dikarenakan masyarakat yang sudah berusia lanjut usia dan masyarakat yang menerima SKTM atau yang terdaftar dalam DTKS tidak diwajibkan untuk membayar uang dalam program Dana Sehat sehingga uang yang terkumpul terkadang tidak sesuai dengan target.



Gambar 10 Wawancara bersama Ketua Posyandu RW 05

- 3) Dana yang dipegang oleh ketua posyandu sebelumnya tidak sampai ke pihak posyandu
Hal ini menyebabkan terjadinya pergantian kepengurusan di Bulan Desember lalu karena dana tersebut hingga sekarang tidak sampai ke pihak posyandu yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk menunjang program pemberian makanan tambahan (PMT).

2) Dampak Masalah

Dari hasil identifikasi masalah, dapat disimpulkan beberapa dampak masalah sebagai berikut:

1) Program Dana Sehat tidak berjalan dengan optimal

Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga program Dana Sehat ini tidak berjalan optimal. Selain itu, kurangnya kesediaan dari kader posyandu untuk turun ke setiap RT dalam pengumpulan Dana Sehat sehingga yang sering turun ke lapangan hanya ketua posyandu dan sebagian kader yang aktif.

2) Keterbatasan dalam pemberian makanan tambahan (PMT)

Hal ini dikarenakan dana yang terkumpulkan dari program Dana Sehat ini tidak mencukupi karena dana yang dikumpulkan dilakukan secara bergilir setiap bulannya, jadi hanya 100 KK yang ditagih dalam program Dana Sehat setiap bulannya dan di bulan selanjutnya 100 KK yang berbeda lagi.

3) Kepercayaan masyarakat kepada kader posyandu menurun

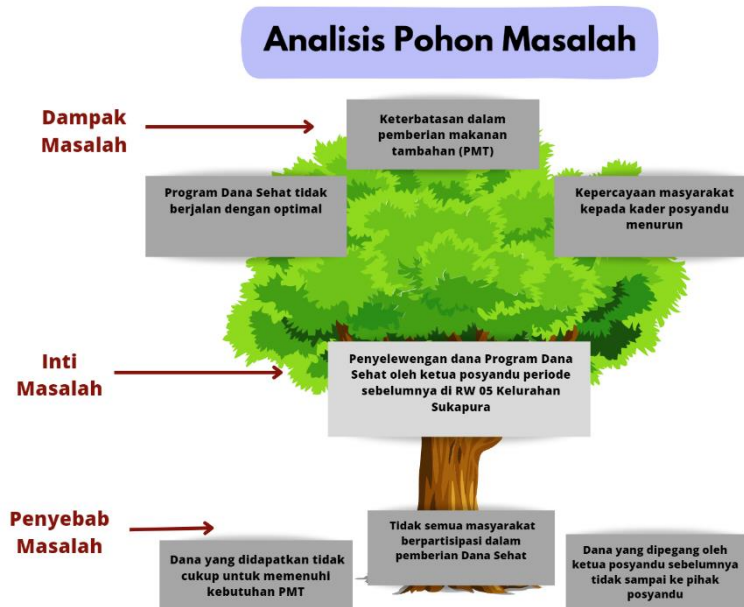
Hal ini dikarenakan pernah terjadinya penyelewengan dana oleh ketua posyandu periode sebelumnya sehingga membuat masyarakat kurang percaya terhadap pendistribusian dana dari program Dana Sehat ini.

3) Fokus Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang ada, praktikan mengambil fokus masalah yaitu penyelewengan dana Program Dana Sehat oleh ketua posyandu periode sebelumnya di RW 05 Kelurahan Sukapura. Fokus masalah ini ditentukan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan bersama kelompok sasaran yaitu Kelompok Posyandu, Kelompok PKK, dan sebagian masyarakat yang mengikuti Posyandu di wilayah RW 05 Kelurahan Sukapura.

4) Analisis Pohon Masalah

Berikut merupakan analisis pohon masalah yang dapat digambarkan dari hasil asesmen yang telah dilakukan:



Gambar 11 Analisis Pohon Masalah Sumber Dana Bantuan Sosial

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu:

- 1) Kebutuhan akan peningkatan pengetahuan dan informasi terkait administrasi pengelolaan Dana Sehat yang tepat.
- 2) Memberikan pendampingan kepada kelompok posyandu agar pemberian makanan tambahan lebih variatif.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada kelompok posyandu terkait sistem sumber yang bisa dijadikan sponsorship dalam mendukung program posyandu.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut merupakan potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Sukapura:

1) Klinik Pratama Yaska Medika

Klinik Pratama Yaska Medika dalam pelaksanaan rencana intervensi berperan sebagai edukator dalam memberikan informasi kepada kader posyandu terkait pemberian makanan tambahan yang tepat dan variatif bagi anak dan balita. Selain itu Klinik Pratama Yaska Medika juga bisa bertindak sebagai sponsorship dalam mendukung program Dana Sehat di Posyandu RW 05.

2) Puskesmas

Puskesmas dalam pelaksanaan rencana intervensi berperan sebagai broker yang menghubungkan antara kader posyandu dan pihak Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan bantuan dana program posyandu.

3) Ketua RW 05

Ketua RW 05 dalam pelaksanaan rencana intervensi mampu bertindak sebagai broker yang menghubungkan kader posyandu dengan sistem sumber lain dan masyarakat untuk memaksimalkan Program Dana Sehat ini sehingga banyak masyarakat yang berpartisipasi.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Penanganan masalah kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat memiliki peran yang sama besar untuk membantu penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sosial. Tujuan dari bantuan sosial tersebut adalah memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar penerima bantuan serta melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Terlebih saat ini pemerintah memfokuskan program untuk mengurangi angka stunting pada anak dan balita sehingga perlu adanya peran penting dari lembaga kesehatan khususnya lembaga posyandu yang menjadi struktur paling bawah dan dekat dengan masyarakat. Dengan adanya kegiatan posyandu, sangat membantu masyarakat perekonomian kebawah untuk memeriksakan anak dan bayinya serta memperoleh makanan tambahan untuk pemenuhan gizi mereka.

Namun, dalam pemberian makanan tambahan pada anak dan balita perlu adanya pemahaman tepat terkait jenis makanan yang diberikan, selain itu sumber dana yang diperlukan juga harus mencukupi untuk menunjang program pemberian makanan tambahan. Seperti halnya di RW 05 Kelurahan Sukapura, kelompok kader posyandu telah berkomitmen melakukan program Dana Sehat untuk menambah pemasukan dalam mendukung pemenuhan makanan tambahan (PMT) bagi anak dan balita. Namun, dalam pengelolaan dana ini masih belum optimal sehingga perlu adanya pendampingan dan pelatihan kepada kader posyandu dalam pengelolaan Dana Sehat ini agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan kegiatan posyandu di RW 05 Kelurahan Sukapura.

b. Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Kader Posyandu terkait pengelolaan dana posyandu yang bersumber dari swadaya masyarakat secara tepat dan optimal melalui program Dana Sehat. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan keterampilan dan pemahaman kader posyandu dalam pengelolaan sumber dana untuk kegiatan posyandu dalam pemberian makanan tambahan (PMT).
- 2) Membantu kelompok posyandu untuk memperoleh tambahan dana dari sistem sumber di sekitar melalui sponsorship.
- 3) Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam membantu program Dana Sehat.
- 4) Adanya transparansi dalam pengelolaan program Dana Sehat setiap bulannya.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan penyelewengan dana yang dilakukan oleh ketua posyandu periode sebelumnya sehingga dana dari Program Dana Sehat tidak sampai ke pihak posyandu yaitu berupa pemberian informasi dan pendampingan langsung kepada kader kelompok posyandu di RW 05 Kelurahan Sukapura terkait alur pengelolaan dan transparansi Dana Sehat sehingga optimal dan tepat sasaran dalam pemenuhan makanan tambahan bagi anak dan balita di RW 05 Kelurahan Sukapura.

Program yang akan dilaksanakan yaitu “Workshop Cerdas Pengelolaan Dana Posyandu dalam Mendukung Program PMT”.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan rencana intervensi yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Sistem Partisipan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	Kelompok Kader Posyandu RW 05 Kelurahan Sukapura
4.	Support System	1. Dinas Kesehatan Kota Bandung 2. Puskesmas Kecamatan Kiaracandong 3. Ketua RW 05
5.	Controlling System	Ketua RW 05
6.	Implementing System	1 Kelompok PKK 2 Perwakilan Pihak Puskesmas
7.	Target System	1 Kelompok Kader Posyandu RW 05 Kelurahan Sukapura 2 Sistem sumber (LSM dan swasta) yang berpotensi sebagai sponsor
8.	Action System	1. Kelompok PKK 2. Pekerja Sosial 3. Perwakilan Pihak Puskesmas

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat adalah metode *Social Group Work* yang dimana target sarannya adalah kelompok kader posyandu di RW 05 Kelurahan Sukapura. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar kelompok sasaran mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, memanfaatkan sistem sumber di sekitar, serta mampu mengorganisir pengelolaan sumber dana di kegiatan posyandu.

Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

1) *Focus Group Discussion*

Meningkatkan kapasitas kelompok kader posyandu RW 05 Kelurahan Sukapura dalam pengelolaan dana program Dana Sehat melalui diskusi dalam dinamika kelompok yang terfokus pada permasalahan yang dihadapi.

2) *Capacity Building*

Peningkatan kapasitas pengetahuan sasaran terkait pengelolaan sumber dana bantuan sosial untuk menunjang kegiatan posyandu di masyarakat dengan melaksanakan kelas praktik dan bimbingan bersama *Fundriser* berpengalaman di bidangnya.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Program Workshop Cerdas Pengelolaan Dana Posyandu dalam Mendukung Program PMT dapat dilaksanakan dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Biaya Analisis Sumber Dana Bansos

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	1	Paket	100.000,00	100.000,00
	Sound System	1	Unit	-	-
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Doorprize	5	Unit	30.000,00	150.000,00
	Infokus	1	Unit	-	-
	Layar Proyektor	1	Unit	-	-
	Jumlah I				325.000,00
2.	Honorarium				
	Perwakilan Puskesmas	1	Orang/Jam	500.000,00	500.000,00
	Jumlah II				500.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	20	Box	10.000,00	200.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	1	Box	10.000,00	10.000,00
	Jumlah III				290.000,00
	Jumlah Keseluruhan				1.115.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Alat Sumber Dana Bansos

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor	1	Buah
Proyektor	1	Buah
Meja narasumber	1	Buah
Meja tamu	1	Buah
Sofa tamu	1	Set
Kursi	20	Buah
ATK	1	Paket
Laptop	1	Buah
Banner kegiatan	1	Buah
Sound system	1	Set
Microfone	1	Buah
Kabel roll (terminal)	2	Buah
Kertas karton	3	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak digunakan berdasarkan analisis SWOT berikut:

Tabel 2. 11 Analisis SWOT Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strength:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Metode pelaksanaan yang efektif karena menggunakan FGD. 2) Adanya pelatihan dan pendampingan bagi kader posyandu. 3) Memiliki indikator keberhasilan yang jelas. 4) Mampu meningkatkan keterampilan kader posyandu dalam pengelolaan Dana Sehat 	<p>Weakness:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak semua masyarakat mampu berperan dalam Dana Sehat. 2) Sulitnya menentukan waktu yang tepat dalam pelaksanaan workshop karena kader posyandu memiliki kesibukan di rumah tangga.
<p>Opportunities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder 2) Adanya respon positif dari kader posyandu dan masyarakat 	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak 2) Lebih mengeksplor lagi materi workshop agar menarik dan sesuai kebutuhan kelompok posyandu 3) Berpacu pada indikator keberhasilan selama pelaksanaan program 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mencari alternatif sumber dana lain untuk menopang jalannya PMT 2) Menentukan waktu pertemuan dengan persetujuan semua kelompok sasaran
<p>Threat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sulitnya mengajak partisipasi kader posyandu secara keseluruhan, karena hanya sebagian yang aktif 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendekatan yang tepat selama proses pendampingan 2) Memberikan motivasi kepada kader posyandu dalam mengelola program Dana Sehat 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan sosialisasi dan metode pelatihan yang lebih menarik serta proses pendampingan yang komunikatif

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Workshop Cerdas Pengelolaan Dana Posyandu dalam Mendukung Program PMT dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa penggunaan metode dan teknik FGD merupakan hal yang tepat dan bisa membuat diskusi secara terfokus sehingga kelompok kader posyandu mampu memahami apa yang disampaikan.

Kemudian kegiatan ini juga didukung oleh berbagai pihak seperti puskesmas dan ketua RW 05 Kelurahan Sukapura. Pihak puskesmas mampu bergerak sebagai edukator dalam pengelolaan pemberian makanan tambahan yang variatif bagi kelompok posyandu. Hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan, tujuannya untuk menarik perhatian anak dan balita untuk ke posyandu secara rutin.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya dua yaitu kesulitan menentukan waktu pelaksanaan dan tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam program Dana Sehat. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program Workshop Cerdas Pengelolaan Dana Posyandu dalam Mendukung Program PMT layak dilaksanakan

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Langkah-Langkah Kegiatan

a. Pra Pelaksanaan

- a) Dalam Workshop Cerdas Pengelolaan Dana Posyandu dalam Mendukung Program PMT yang akan dilaksanakan, Praktikan akan mengundang Pihak Kelurahan Sukapura, Ketua RW 05, Pihak Puskesmas, dan kelompok kader posyandu RW 05.
- b) Terdapat dua materi yang akan dibawakan dalam kegiatan Sosialisasi ini, yaitu, materi pertama terkait Strategi Pengelolaan Sumber Dana dari Swadaya Masyarakat untuk Kegiatan Posyandu. Materi kedua terkait Pemberian Makanan Tambahan yang Variatif.
- c) Narasumber yang menyajikan materi tersebut adalah Ketua PKK Kelurahan Sukapura dan Pihak Puskesmas Kiaracandong.
- d) Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berjalannya kegiatan sosialisasi ini adalah di Aula Kantor Kelurahan Sukapura.

b. Pelaksanaan

- a) Sambutan oleh Lurah Kelurahan Sukapura.
- b) Pembacaan Doa oleh Pekerja Sosial.
- c) Pemberian materi tentang Strategi Pengelolaan Sumber Dana dari Swadaya Masyarakat untuk Kegiatan Posyandu
- d) Ice breaking.
- e) Pemberian materi tentang Pemberian Makanan Tambahan yang

- Variatif.
- f) ISHOMA.
 - g) Pendampingan dalam pembuatan proposal kerjasama dan laporan keuangan yang baik.
 - h) Penutup.
- c. Pasca Pelaksanaan
- a) Penyusunan Laporan oleh Pekerja Sosial.
 - b) Dokumentasi sebagai Bukti Kegiatan.
 - c) Monitoring dan Evaluasi
- 2) Jadwal Kegiatan
- Berikut merupakan jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan program

Tabel 2. 12 Jadwal Kegiatan Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	09.00-09.10	Pembukaan	Sie. Acara	Pembukaan oleh Lurah Sukapura
2.	09.10-09.15	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pekerja sosial
3.	09.15-10.30	Pemberian Materi	Sie. Acara	Materi: Strategi Pengelolaan Sumber Dana dari Swadaya Masyarakat untuk Kegiatan Posyandu Pemateri: Ketua PKK Kelurahan Sukapura
4.	10.30-10.45	Ice Breaking	Sie Acara	-
5.	10.45-12.00	Pemberian Materi	Sie Acara	Materi: Pemberian Makanan Tambahan yang Variatif Pemateri: Pihak Puskesmas Kiaracandong
6.	12.00-13.00	ISOMA	Sie. Konsumsi	Istirahat, Sholat, dan makan siang
7.	13.00-15.00	Pendampingan dalam pembuatan proposal kerjasama (sponsorship) dan laporan keuangan yang baik	Sie. Acara	-
8.	15.00-15.15	Penutup	Sie. Acara	-

i. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari program ini adalah:

- 1) Kader posyandu mampu memahami dan mengaplikasikan strategi pengelolaan dana bantuan sosial yang tepat.

- 2) Kader posyandu mampu membuat laporan pertanggungjawaban terkait program Dana Sehat setiap bulannya.
- 3) Adanya transparansi Program Dana Sehat oleh kader posyandu.
- 4) Meningkatkan kepekaan kader posyandu akan pentingnya pemberian makanan tambahan yang variatif.
- 5) Mencegah terjadinya tindak penyelewengan dana bantuan sosial untuk operasional kegiatan posyandu oleh oknum tertentu.
- 6) Terlaksananya program pemberian makanan tambahan yang mampu menarik minat anak dan balita ke posyandu.

C. Profil Analisis Pemberdayaan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Permasalahan lingkungan yang dihadapi wilayah perkotaan salah satunya adalah persoalan sampah. Produksi sampah meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan jumlah konsumsi serta gaya hidup masyarakat. Hal ini tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kebanyakan negara berkembang menghadapi masalah kurangnya fasilitas daur ulang dan tingkat pemilahan sampah yang rendah. Rata-rata produksi sampah di Kota Bandung setiap hari adalah 1.600 Ton. Sebagian besar sampah di Kota Bandung bersumber dari permukiman dengan presentase mencapai 65,6% dari total rata-rata produksi sampah per harinya. Sisanya berasal dari pasar 18,8%, perkantoran 5,5%, daerah komersil 6%, fasilitas publik 2,8% dan lainnya 1,3%.

Pengelolaan sampah saat ini masih dilakukan dengan pola kumpul – angkut – buang. Pengurangan sampah pola 3R (Reduce, Reuse, Recycle) hanya mencapai 14,2% sedangkan sebanyak 73,7% diangkut ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) regional Kota Bandung. Total sampah yang bersumber pada permukiman sebagian besar adalah sampah organik sekitar 63%, sampah yang bisa di daur ulang sebanyak 23% sedangkan sisanya sebanyak 14% adalah sampah residu. Artinya, Kota Bandung potensial untuk dapat mengurangi jumlah sampah rumah tangga yang di angkut ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dengan melakukan pemilahan sampah sejak dari sumber dan mengolah sampah organiknya. Membuang sampah ke TPA hanyalah memindahkan sampah tersebut dari lokasi rumah tangga ke TPA seperti memindah masalah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pengelolaan sampah saat ini hanya memperhatikan TPA (*end of pipe*) tanpa memperhitungkan proses yang dapat dilakukan di sumber dengan menerapkan 3R.

Pemerintah Kota Bandung memperkenalkan konsep pengelolaan sampah 3R dalam bentuk yang mudah diterima masyarakat lokal karena memiliki unsur kesundaan dan agar lebih akrab di lingkungan masyarakat dengan membuat program Kang Pisman (kurangi, pisahkan, dan

manfaatkan). Kang Pisman diharapkan menjadi gerakan kolaborasi antara pemerintah, warga, swasta dan pihak lainnya dalam membangun peradaban baru pengelolaan sampah yang lebih maju. Tujuan dari program Kang Pisman ini mengarah pada pengelolaan sampah dengan konsep zero waste

Program Kang Pisman ini selanjutnya di distribusikan ke setiap kelurahan hingga ke tingkat RW. Salah satunya di Kelurahan Sukapura terdapat satu RW yaitu RW 10 yang telah mengadopsi program Kang Pisman ini dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan dengan mengelola sampah menjadi barang yang bernilai jual ekonomis.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala diantaranya koordinasi antar masyarakat dengan pihak PKK dalam pemilahan sampah belum optimal serta minat dan partisipasi kelompok sasaran keluarga miskin dan rentan kurang dalam upaya pemberdayaan melalui pemanfaatan sampah ini.

2. Tinjauan Konsep

a. Pemberdayaan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya

b. Aras Pemberdayaan Sosial

Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, meso, dan makro.

- 1) Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan konseling, stress management, krisis intervensi. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugastugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (Task Centered Approach).
- 2) Aras Meso. Pemberdayaan dilakukan pada sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan

sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

- 3) Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi sistem besar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasisituasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

c. Dasar Hukum Pemberdayaan Sosial

Berikut merupakan dasar hukum pelaksanaan pemberdayaan sosial di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

d. Kelompok Rentan

Menurut Inter-agency Network for Education in Emergencies, kelompok rentan adalah mereka yang memiliki kerentanan dan mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial sehingga tidak mampu mengakses layanan dasar dan membutuhkan bantuan khusus dari negara atau komunitas lainnya.

Sedangkan menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas.

Sehingga kelompok rentan ini termasuk dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019, yang menjelaskan PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

e. Program Kang Pisman

Program Kang Pisman di Kota Bandung merupakan program pemerintah Kota Bandung pada masa kepemimpinan Wali Kota Bandung periode 2018-2023 dalam upaya untuk mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Bandung, kemudian program tersebut dilimpahkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung berdasarkan peraturan daerah Kota Bandung nomor 9 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah untuk dapat melaksanakan program tersebut sebagai

salah satu program yang harus dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Program Kang Pisman yang memiliki tujuan untuk dapat mengurangi hingga dapat dikatakan *zero waste* hingga menjadi budaya bagi masyarakat Kota Bandung. Program Kang Pisman yang dimulai pada tahun 2018 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat Kota Bandung dalam mengatasi permasalahan sampah yang ada.

f. Konsep Zero Waste

Zero waste merupakan suatu konsep perancangan dan pengelolaan produk dan sistem secara sistematis. Konsep *zero waste* dilakukan untuk menghindari dan mengurangi jumlah sampah dan SDA yang digunakan, serta untuk mengkonservasi dan memulihkan kembali SDA yang sudah terkena dampak oleh limbah (Zaman dan Lehmann, 2011). Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah sampah adalah dengan penerapan *zero waste* berbasis *Sustainable Development Goals*. Penerapan *zero waste* ini merupakan cara hidup tanpa atau meminimalkan penggunaan sampah plastik

Konsep *zero waste* merupakan suatu konsep berkelanjutan nyata yang dapat diterapkan di masyarakat khususnya di rumah tangga. konsep *zero waste* memberi pengetahuan untuk peduli terhadap lingkungan akibat dari timbulan sampah yang tidak di kelola dengan baik sehingga dapat merusak ekosistem dan menyebabkan masalah kesehatan bagi lingkungan sekitar. Membantu dalam menekan timbulan sampah yang dihasilkan karena sampah yang dihasilkan dari rumah tangga di olah terlebih dahulu berdasarkan jenis dan dibedakan organik dan anorganik sehingga sampah dimanfaatkan terlebih dahulu dan bernilai kembali.

Kerjasama dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan organisasi peduli lingkungan untuk melaksanakan penerapan konsep zero waste pada kehidupan sehari-hari. Konsep *zero waste* ini dapat berjalan dengan baik apabila semua bekerja sama dengan baik, seperti masyarakat melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, pemerintah memberikan kebijakan, edukasi dan memiliki tempat pengelolaan sampah seperti bank sampah.

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Masyarakat dan Pemerintahan di Kelurahan Sukapura telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pemberdayaan sosial kepada masyarakat yang termasuk dalam kategori PMKS dan PSKS. Bentuk program pemberdayaan pun beragam, mulai dari program turunan dari pemerintah kabupaten/kota ke pihak kelurahan dan RW hingga program pemberdayaan yang berasal dari komunitas masyarakat setempat sebagai suatu upaya pemberdayaan sosial oleh masyarakat untuk masyarakat pula.

Pada 8 Maret 2023, praktikan melakukan *fokus group discussion* bersama kelompok PKK RW 10 yang berasal dari perwakilan setiap RT di Aula Kantor RW 10 Kelurahan Kiaracandong. *Fokus group discussion* yang dilaksanakan melalui wawancara mendalam dan diskusi terkait program pemberdayaan sosial yang telah dilaksanakan oleh kelompok PKK RW 10 dengan target sasaran yang terlibat yaitu kelompok miskin dan rentan seperti ibu rumah tangga miskin dan kelompok lansia yang ada di Kelurahan Sukapura. Adapun program pemberdayaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Identifikasi Masalah Analisis Pemberdayaan Sosial

Nama Program	Target Sasaran	Keterangan
Kang Pisman	Ibu rumah tangga miskin Kelompok Lansia Pemulung	Kegiatan mengolah sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis yang selanjutnya dipasarkan.
Pelatihan Pembuatan Sabun dari Minyak Jelantah	Kader PKK	Kegiatan yang merupakan program kerja Kelurahan Sukapura
Kencleng	Ibu hamil Bayi & balita	Kegiatan pengumpulan sumbangan kepada masyarakat yang datang ke posyandu yang selanjutnya dana tersebut disalurkan untuk pencegahan stunting
Beas Perelek	Masyarakat miskin	Kegiatan pengumpulan beras sebanyak 7 sendok/hari/KK yang selanjutnya dijual kembali ke masyarakat miskin dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran.

Berdasarkan hasil identifikasi program pemberdayaan sosial yang ada di lingkungan RW 10, maka praktikan mengambil program pemberdayaan sosial Kang Pisman. Karena dari setiap RW di Kelurahan Sukapura, hanya RW 09 dan RW 10 yang sejauh ini berhasil menjalankan program Kang Pisman ini sebagai upaya pemberdayaan sosial masyarakat. Namun, meskipun mampu menjalankan program dengan baik, masih terdapat

kendala dari segi partisipasi masyarakat dan target sasaran yang diberdayakan. Terlebih sejak Covid-19 program pernah terhenti dan kelompok PKK harus membangun kembali semangat dan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan kembali program ini.



Gambar 12 Wawancara bersama Kelompok PKK RW 10

a. Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka penyebab masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Partisipasi masyarakat menurun

Akibat Covid-19 yang terjadi membuat partisipasi masyarakat menurun dan saat ini hanya kelompok PKK dan sebagian masyarakat miskin yang masih terus melanjutkan program ini.

2) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

Hal ini dikarenakan keterbatasan dari kelompok PKK dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga kurang menarik minat masyarakat dan produk yang dihasilkan terbatas.

3) Keterbatasan waktu pelatihan

Adanya kesibukan yang berbeda dari setiap kelompok sasaran sehingga sulit menentukan waktu pelatihan dalam pembuatan produk dari barang bekas ini.

4) Belum menemukan target pasar yang tepat

Barang bekas yang sudah menjadi produk hasil daur ulang belum memiliki potensi pemasaran yang baik. Sejauh ini pemasaran produk hanya ketika pameran yang dilaksanakan.

b. Dampak Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan penyebab masalah tersebut, adapun dampak masalah yang dihasilkan yaitu:

1) Program Kang Pisman tidak berjalan optimal

Hal ini dikarenakan menurunnya minat dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program sehingga menyebabkan pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana hasil yang diharapkan.

2) Produk yang dihasilkan kurang bervariasi

Hal ini karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung serta kurangnya koordinasi antar setiap pihak dan stakeholder yang terlibat sehingga proses dari setiap tahap kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3) Pemasaran produk terbatas

Hal ini dikarenakan, masyarakat tidak menetapkan target pasar dan produk yang dihasilkan kurang menarik sehingga perlu adanya *upgrade* baik dari segi kelayakan produk maupun sistem pemasaran.

4) Pelatihan pengolahan barang bekas terhambat

Hal ini dikarenakan sulitnya menemukan waktu yang pas dalam kegiatan pelatihan dan partisipasi masyarakat juga menurun terhadap minatnya dalam mendaur ulang sampah.

c. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka praktikan mengambil fokus masalah yaitu kurangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat di RW 10 Kelurahan Sukapura dalam program Kang Pisman sehingga program tidak berjalan optimal. Fokus masalah ini diambil berdasarkan hasil asesmen bersama kelompok PKK RW 10.

d. Analisis Pohon Masalah

Berikut merupakan analisis pohon masalah yang dapat digambarkan dari hasil asesmen yang telah dilakukan:



Gambar 13 Analisis Pohon Masalah Pemberdayaan Sosial

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu:

- 1) Kebutuhan akan peningkatan pengetahuan dan informasi terkait strategi pemasaran produk.
- 2) Kebutuhan akan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat kelompok sasaran agar kembali berpartisipasi aktif.
- 3) Memberikan pelatihan pengelolaan produk yang memiliki daya tarik dan daya jual tinggi melalui daur ulang barang bekas kepada kelompok sasaran.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut merupakan potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Sukapura:

- 1) Kelompok PKK Kelurahan Sukapura
Kelompok PKK Kelurahan Sukapura dalam pelaksanaan rencana intervensi berperan sebagai motivator dalam mengajak peran partisipasi kelompok sasaran yang semangatnya menurun.
- 2) Karang Taruna
Karang Taruna dalam rencana intervensi berperan sebagai edukator dalam memberikan informasi kepada kelompok sasaran terkait kreativitas pengolahan produk daur ulang dari sampah agar memiliki nilai jual tinggi.

- 3) Ketua RW 10
Ketua RW 05 dalam pelaksanaan rencana intervensi mampu bertindak sebagai motivator hingga penghubung dengan stakeholder lain dalam upaya penyebarluasan pemasaran produk.
- 4) Petugas/Tim Kebersihan RW 10
Tim kebersihan yang mengangkut sampah rumah tangga bisa menjadi sistem sumber dalam pelaksanaan rencana intervensi dimana kelompok PKK RW 10 bisa bekerjasama dalam proses pemilahan sampah.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Dalam konteks pemberdayaan sosial merupakan suatu usaha memberdayakan masyarakat sekitar dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada di lingkungan sekitar mereka. Pemberdayaan sosial bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat dan menjadikan masyarakat itu berdaya dan mampu memenuhi kebutuhannya.

Banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan permasalahan yang ada di lingkungan untuk menjadi suatu inovasi dalam membuat program pemberdayaan. Seperti halnya program Kang Pisman di RW 10 yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan bekerjasama dengan kelompok PKK dalam melakukan daur ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Hal ini tentu menjadi suatu inovasi yang baik karena mengelola barang yang terbuang menjadi barang yang bisa digunakan kembali dan memiliki nilai jual.

Namun, dalam pelaksanaannya minat masyarakat yang menjadi target sasaran kegiatan ini menurun, hal ini dikarenakan kurangnya motivasi untuk kelompok miskin ini berpartisipasi lebih dan produk yang dihasilkan pun belum bervariasi sehingga sulit untuk menentukan target pasar. Hal ini justru menjadi problematika jika tidak segera diatasi dan mampu menghambat jalannya program Kang Pisman ini.

b. Tujuan Umum dan khusus

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kader PKK dan Kelompok Miskin terkait urgensi Kegiatan Kang Pisman dalam pemberdayaan sosial masyarakat untuk meningkatkan perekonomian kelompok miskin. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan keterampilan dan pemahaman kader PKK dan Kelompok miskin terkait urgensi program Kang Pisman.
- 2) Mendorong masyarakat untuk menciptakan produk daur ulang yang bervariasi dan memiliki nilai jual tinggi.
- 3) Membantu kelompok PKK untuk memperoleh tambahan dana dari sistem sumber di sekitar melalui sponsorship.

- 4) Meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat miskin dalam kegiatan Kang Pisman.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan kurangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat di RW 10 Kelurahan Sukapura dalam program Kang Pisman sehingga program tidak berjalan optimal yaitu berupa pemberian informasi dan pelatihan langsung kepada kader PKK dan kelompok miskin di RW 10 terkait pengelolaan daur ulang sampah menjadi produk yang unik dan bernilai jual tinggi.

Program yang akan dilaksanakan yaitu “Workshop CERMAT (Cerdas Mengelola Sampah menjadi Produk Bermanfaat)”.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Sistem Partisipan Analisis Pemberdayaan Sosial

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	Kelompok PKK RW 10 Kelompok miskin RW 10
4.	Support System	1. Dinas Sosial Kota Bandung 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 3. Ketua RW 10
5.	Controlling System	Ketua RW 10 Ketua PKK RW 10
6.	Implementing System	1 Kelompok PKK RW 10 2 Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Sukapura
7.	Target System	1 Kelompok Kader PKK RW 10 Kelurahan Sukapura 2 Masyarakat miskin RW 10
8.	Action System	1. Kelompok PKK 2. Pekerja Sosial 3. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 4. Kelompok Pepelingasih

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat adalah

Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/ Pengembangan Organisasi (*Community Organization/CD*). Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/ Pengembangan Organisasi (*Community Organization/CD*) adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

1) Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial adalah sebuah proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2) *Focus Group Discussion* atau Diskusi Kelompok Terfokus

Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci. Tujuan dari metode itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik.

3) *Capacity Building*

Peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sasaran terkait pengelolaan daur ulang sampah di program Kang Pisman dengan melaksanakan kelas praktik dan bimbingan bersama *Fundriser* berpengalaman di bidangnya

4) Monitoring dan Evaluasi

Monitor merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan baik selama proses kegiatan maupun pada akhir program. Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Program Workshop CERMAT (Cerdas Mengelola Sampah menjadi Produk Bermanfaat) dapat dilaksanakan dengan rencana anggaran biaya sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Jadwal Kegiatan Analis Pemberdayaan Sosial

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Logistik				
	ATK	1	Paket	100.000,00	100.000,00
	Sound System	1	Unit	-	-
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Doorprize	5	Unit	30.000,00	150.000,00
	Infokus	1	Unit	-	-
	Layar Proyektor	1	Unit	-	-
	Sampah plastik (botol, bekas detergen, dll)	100	Buah	-	-
	Lem tembak	5	Buah	20.000,00	100.000,00
	Jumlah I				305.000,00
2	Honorarium				
	Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup	1	Orang/Jam	0	0
	Kelompok Pepelingsih	1	Orang/Jam	500.000,00	500.000,00
	Jumlah II				500.000,00
3	Konsumsi				
	Snack peserta	45	Box	10.000,00	450.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	2	Box	10.000,00	20.000,00
	Jumlah III				550.000,00
	Jumlah Keseluruhan				1.355.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Alat Analisis Pemberdayaan Sosial

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor	2	Buah
Proyektor	2	Buah
Meja narasumber	1	Buah
Meja tamu	1	Buah
Sofa tamu	1	Set
Kursi	45	Buah
ATK	1	Paket
Laptop	1	Buah
Banner kegiatan	1	Buah
Sound system	1	Set
Microfone	2	Buah
Kabel roll (terminal)	2	Buah
Sampah anorganik	100	Buah
Lem tembak	5	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak dilaksanakan berdasarkan analisis SWOT berikut:

Tabel 2. 17 Analisis SWOT Analisis Pemberdayaan Sosial

Faktor Internal	Strength: <ol style="list-style-type: none"> 1) Metode pelaksanaan yang efektif karena menggunakan FGD. 2) Adanya pendampingan selama kegiatan pelatihan. 3) Memiliki indikator keberhasilan yang jelas. 4) Mampu meningkatkan keterampilan kader PKK dan kelompok rentan dalam pengelolaan sampah daur ulang 5) Mendorong masyarakat mengelola sampah menjadi barang berguna 	Weakness: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sulitnya mengajak partisipasi kelompok rentan 2) Kurangnya SDM dalam pemilahan sampah
Faktor Eksternal		
Opportunities: <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder 2) Adanya respon positif dari kader PKK dan masyarakat 3) Adanya respon positif dan dukungan dari Ketua RW 10 	Strategi SO: <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak 2) Lebih mengeksplor lagi strategi pelatihan yang menarik minat masyarakat 3) Berpacu pada indikator keberhasilan selama pelaksanaan program 	Strategi WO: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melibatkan stakeholder dan orang yang berpengaruh dalam mengundang masyarakat untuk berpartisipasi 2) Membentuk kerjasama dengan Tim Gober dan masyarakat di setiap rumah untuk memilah sampah
Threat: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sulitnya mengajak partisipasi masyarakat rentan 	Strategi ST: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pendekatan yang tepat selama proses pendampingan 2) Memberikan motivasi kepada kelompok rentan dalam mengelola sampah menjadi produk bermanfaat 	Strategi WT: <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan sosialisasi dan metode pelatihan yang lebih menarik serta proses pendampingan yang komunikatif

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Workshop CERMAT (Cerdas Mengelola Sampah menjadi Produk Bermanfaat) dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa penggunaan metode dan teknik FGD merupakan hal yang tepat dan bisa membuat diskusi secara terfokus sehingga kelompok PKK dan Masyarakat rentan mampu memahami apa yang disampaikan. Selain itu adanya pendampingan selama kegiatan pelatihan akan memudahkan kelompok sasaran dalam mengembangkan potensinya dan bertanya dengan leluasa.

Kemudian kegiatan ini juga didukung oleh berbagai pihak seperti kelompok Pepelingasih, Pihak Kelurahan Sukapura, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, dan ketua RW 10 Kelurahan Sukapura. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Kelompok Pepelingasih mampu bergerak sebagai edukator dalam pengelolaan daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat. Hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola sampah menjadi produk yang memiliki nilai jual sehingga hal ini juga mampu memberdayakan masyarakat sekitar.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya dua yaitu kurangnya partisipasi masyarakat miskin dan rentan serta kurangnya SDM dalam memilah sampah sebelum dikelola menjadi produk. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program Workshop CERMAT (Cerdas Mengelola Sampah menjadi Produk Bermanfaat) layak dilaksanakan

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Langkah-Langkah Kegiatan

a. Pra Pelaksanaan

- a) Dalam Workshop CERMAT (Cerdas Mengelola Sampah menjadi Produk Bermanfaat) yang akan dilaksanakan, Praktikan akan mengundang Pihak Kelurahan Sukapura, Ketua RW 10, Pihak Pepelingasih, Kelompok PKK RW 10, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat perekonomian rendah.
- b) Terdapat dua materi yang akan dibawa dalam kegiatan Sosialisasi ini, yaitu, materi pertama terkait Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Kang Pisman dalam Upaya Pemberdayaan Sosial. Materi kedua terkait Strategi Pengelolaan Sampah Menjadi Barang yang Bernilai Jual Ekonomis.
- c) Narasumber yang menyajikan materi tersebut adalah Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Ketua Kelompok Pepelingasih.
- d) Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berjalannya kegiatan sosialisasi ini adalah di Aula Kantor RW 10.

b. Pelaksanaan

- a) Sambutan oleh Ketua RW 10 Kelurahan Sukapura.
- b) Sambutan oleh Lurah Kelurahan Sukapura.
- c) Pembacaan Doa oleh Pekerja Sosial.
- d) Pemberian materi tentang Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Kang Pisman dalam Upaya Pemberdayaan Sosial
- e) Ice breaking.

- f) Pemberian materi tentang Strategi Pengelolaan Sampah Menjadi Barang yang Bernilai Jual Ekonomis.
 - g) ISHOMA.
 - h) Pelatihan mengelola sampah menjadi produk.
 - i) Penutup.
- c. Pasca Pelaksanaan
- a) Penyusunan Laporan oleh Pekerja Sosial.
 - b) Dokumentasi sebagai Bukti Kegiatan.
 - c) Monitoring dan Evaluasi
- 2) Jadwal Kegiatan

Berikut merupakan jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan program

Tabel 2. 18 Jadwal Kegiatan Analis Pemberdayaan Sosial

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	09.00-09.05	Pembukaan	Sie Acara	Sambutan Ketua RW 10
2.	09.05-09.10		Sie. Acara	Pembukaan oleh Lurah Sukapura
3.	09.10-09.15	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pekerja sosial
4.	09.15-10.30	Pemberian Materi	Sie. Acara	Materi: Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Mensukseskan Program Kang Pisman dalam Upaya Pemberdayaan Sosial. Pemateri: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung
5.	10.30-10.45	Ice Breaking	Sie Acara	-
6.	10.45-12.00	Pemberian Materi	Sie Acara	Materi: Strategi Pengelolaan Sampah Menjadi Barang yang Bernilai Jual Ekonomis Pemateri: Ketua Pepelingsih Kota Bandung
7.	12.00-13.00	ISOMA	Sie. Konsumsi	Istirahat, Sholat, dan makan siang
8.	13.00-15.00	Pelatihan Pengolahan Sampah menjadi Produk	Sie. Acara	-
9.	15.00-15.15	Penutup	Sie. Acara	-

i. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari program ini adalah:

- 1) Kader PKK dan masyarakat sasaran (kelompok miskin) dapat memahami informasi yang diberikan dan diaplikasikan dalam praktiknya.
- 2) Kader PKK mampu menjadi pilot project dalam memberikan pelatihan lanjutan kepada kelompok miskin.

- 3) Adanya inovasi baru terhadap produk daur ulang yang dihasilkan.
- 4) Memperoleh kerjasama dalam distribusi produk sehingga mampu bersaing di pasaran.
- 5) Mampu memberdayakan masyarakat miskin melalui pemanfaatan barang bekas untuk meningkatkan perekonomian.
- 6) Mampu menarik minat dan partisipasi kelompok miskin yang menjadi target sasaran lebih banyak lagi.

D. Profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial

1. Gambaran Umum Masalah

Adanya peningkatan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal mengakibatkan bertambah besarnya angka pengangguran. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima di kota-kota besar. Dengan semakin kecilnya peluang kerja di perusahaan-perusahaan tersebut membuat sektor informal tumbuh subur diantaranya menjadi pedagang kaki lima dengan memanfaatkan ruang-ruang kota yang ada seperti trotoar, dan beberapa ruang terbuka umum (*public space*).

Pertumbuhan sektor informal seperti pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk elastisitas masyarakat dalam upaya untuk mendapatkan penghasilan dan menafkahi keluarga. Akan tetapi jika perkembangannya tidak direncanakan dan ditempatkan pada lokasi yang tepat akan menimbulkan permasalahan seperti ketidakteraturan wajah kota, kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah dan masalah-masalah lainnya.

Seperti halnya yang terjadi di RW 13 Kelurahan Sukapura, dimana banyak pedagang kaki lima yang membuka lapak di sepanjang jalan, terlebih di lokasi yang dekat dengan sekolah dan minimarket. Hal ini menuai pro kontra bagi masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat menganggap hal tersebut memudahkan mereka untuk membeli makanan karena dekat dengan lokasi tempat tinggal. Namun, sebagian masyarakat kontra terhadap hal tersebut karena mengganggu lalu lintas jalan yang sempit serta menimbulkan lingkungan yang kumuh akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik setelah berdagang. Selain itu, adanya pedagang kaki lima yang tidak teratur membuat tata kelola kota menjadi kurang bagus.

Karena keadaan ini tak jarang masyarakat sering mengeluh karena jalanan macet akibat jalan yang sempit dan diperparah dengan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan dan sebagian tidak memiliki lahan parkir untuk menampung motor pembeli ketika berhenti.

Sehingga perlu adanya kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan ini, karena apabila dibiarkan berlarut maka akan menciptakan masalah sosial baru yang

merugikan masyarakat. Selain itu dalam membuat suatu kebijakan nantinya, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup pedagang kaki lima sehingga tidak terjadi perselisihan nantinya ketika kebijakan dibuat.

2. Tinjauan Konsep

a. Definisi Lingkungan Sosial

Menurut Barnett dan Casper, Pengertian lingkungan sosial, konteks sosial, konteks sosiokultural, atau milieu adalah sesuatu hal yang didefinisikan sebagai suasana fisik atau suasana sosial dimana manusia hidup didalamnya, atau dimana sesuatu terjadi dan berkembang. Lingkungan sosial tersebut bisa berupa kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang individu, atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi dengan individu tersebut. (Barnett dan Casper, 2001:91).

Menurut Purba, Pengertian lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan (tata ruang). (Purba, 2002: 13-14).

b. Penataan Lingkungan Sosial

Berdasarkan pendapat dari Jonny Purba dalam bukunya Pengelolaan Lingkungan Sosial, mendefinisikan secara teoritis pengelolaan lingkungan sosial dapat diartikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan:

- a) ketahanan sosial (daya dukung dan daya tampung sosial setempat);
- b) keadaan ekosistemnya;
- c) tata ruangnya;
- d) kualitas sosial setempat (kualitas objektif dan subjektif);
- e) sumber daya sosial (potensi) dan keterbatasan (pantangan) yang bersifat kemasyarakatan (yang tampak dalam wujud pranata, pengetahuan lingkungan, dan etika lingkungan);
- f) kesesuaian dengan azas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup.

c. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjual dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum,

lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut:

- a) Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- b) Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya mejual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil.
- c) Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran
- d) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil
- e) Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah
- f) Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak menentu
- g) Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
- h) Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha "*familt enterprise*", artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
- i) Mempunyai sifat "*one man enterprise*", yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang
- j) Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k) Sebagian Pedagang Kaki Lima melakukan usahanya secara musiman, sering kali jenis dagangannya berubah-ubah
- l) Pedagang Kaki Lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
- m) Anggapan bahwa para Pedagang Kaki Lima ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat
- n) Pedagang Kaki Lima tidak memiliki jam kerja yang tetap
- o) Pedagang Kaki Lima memiliki jiwa "*entrepreneurship*" yang tinggi

d. Ketentuan Hukum Mengenai Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Berikut ini merupakan ketentuan hukum yang dibentuk oleh pemerintah Kota Bandung sebagai landasan atau dasar dalam menangani permasalahan pedagang kaki lima di Kota Bandung:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Daerah telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas

maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2012 ini mengatur tentang pemberdayaan pedagang kaki lima, penataan pedagang kaki lima serta Tim koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan pedagang kaki lima adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah:

- a) Bahwa pedagang kaki lima sebagai bentuk kegiatan pelaku usaha di sektor informal, keberadaanya memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan, dan kreatifitas kepada masyarakat Kota Bandung.
- b) Bahwa untuk mengakomodasikan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan langkahlangkah yang dapat menempatkan pedagang kaki lima sebagai bagian yang integral dari perencanaan, pelaksanaan program pemerintah, dan kebijakan yang berkenaan dengan penataan kota, khususnya yang berkaitan dengan ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota.
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan di sektor formal membuat masyarakat harus berinovasi dan beralih ke sektor informal untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu sektor informal yang banyak dimanfaatkan masyarakat yaitu menjadi pedagang kaki lima dengan memanfaatkan lokasi yang ada misalnya di trotoar dan sepanjang badan jalan yang ramai dilewati oleh calon pembeli.

Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Sukapura, dimana sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah pedagang kaki lima yang memanfaatkan badan jalan dan tempat umum yang ramai sebagai lokasi berjualan. Pada 15 Maret 2023, kelompok praktikan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi lokasi yang dijadikan tempat perdagangan oleh pedagang kaki lima dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Identifikasi Masalah Analisis Penataan Lingkungan

Lokasi (RW)	Banyak PKL	Penjelasan
RW 05	20 PKL	PKL berdagang dominan menggunakan gerobak kecil, target sasaran anak sekolah dan masyarakat sekitar, lokasi perdagangan di sekeliling lapangan futsal dan cukup dekat dengan pembuangan akhir sampah
RW 13	23 PKL	PKL berjualan di sepanjang badan jalan yang bersebelahan dengan kali. Terlebih lokasi berjualan berada di jalan yang sempit dan dengan adanya gerobak PKL membuat kondisi lingkungan terlihat kumuh.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, terdapat dua RW yang menjadi pusat para pedagang kaki lima untuk melakukan kegiatan ekonomi dan hal ini menimbulkan pro kontra bagi masyarakat sekitar. Dari hasil identifikasi masalah tersebut, praktikan mengambil sampel pedagang kaki lima di RW 13 Kelurahan Sukapura sebagai objek dalam melakukan asesmen.

Selanjutnya pada 24 Maret 2023 praktikan melakukan wawancara langsung kepada bidang kesejahteraan sosial Kelurahan Sukapura, para pedagang di sekitar RW 13, dan sebagian masyarakat sekitar terkait permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya pedagang kaki lima di lokasi tersebut. Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa banyak warga yang mengeluh karena badan jalan yang digunakan pedagang kaki lima menyebabkan kemacetan serta lingkungan kumuh akibat ketidakteraturan posisi kios pedagang dan banyak pedagang kaki lima membuang sampahnya ke kali/sungai.



Gambar 14 Lokasi PKL RW 13 Dekat Sungai/Kali

1) Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka penyebab masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

- 1) Pedagang Kaki Lima tidak memiliki lahan memadai untuk berjualan
Hal ini dikarenakan, pedagang kaki lima umumnya warga dengan pendapatan ekonomi menengah kebawah dan tinggal di gang sempit sehingga mereka tidak memiliki lahan yang memadai untuk berjualan sehingga memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi untuk berdagang.
- 2) Lokasi yang ditempati dianggap strategis bagi Pedagang Kaki Lima
Badan jalan dianggap sebagai lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima, hal ini dikarenakan mereka tidak perlu menyewa tempat dengan harga mahal dan lokasi tersebut sering dilewati warga sehingga ramai pembeli.
- 3) Tidak teraturnya tata letak kios Pedagang Kaki Lima
Pedagang kaki lima yang berdagang di badan jalan secara sembarangan membuat ketidakteraturan, hal ini dikarenakan keberagaman kios makanan dan/atau minuman yang dijual tidak tertata dengan rapi.
- 4) Sampah bekas jualan dibuang sembarangan ke kali
Pedagang kaki lima di RW 13 Kelurahan Sukapura seringkali membuang sampah ke sungai sehingga menyebabkan sungai penuh sampah dan kualitas lingkungan sekitar menurun.

2) Dampak Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka dampak masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan terlihat kotor dan kumuh

Hal ini dikarenakan, jarak dan ketidakteraturan kios pedagang kaki lima sehingga lingkungan terlihat kumuh. Selain itu pengelolaan sampah dari hasil dagangan juga tidak terkelola dengan baik dan masih banyak yang pedagang yang membuang sampah sembarangan di lokasi tempat berdagang.

2) Kemacetan lalu lintas

Akibat badan jalan yang digunakan sebagai lokasi berdagang oleh pedagang kaki lima membuat masalah baru yaitu kemacetan karena jalanan yang sempit diperparah dengan keberadaan kios pedagang kaki lima sehingga akses pengendara terganggu, terlebih adanya kendaraan yang berhenti di pinggir jalan untuk membeli dagangan.

3) Menurunnya estetika penataan kota

Akibat ketidakteraturan penataan kios pedagang kaki lima, menyebabkan penurunan estetika penataan kota khususnya di RW 13 Kelurahan Sukapura.

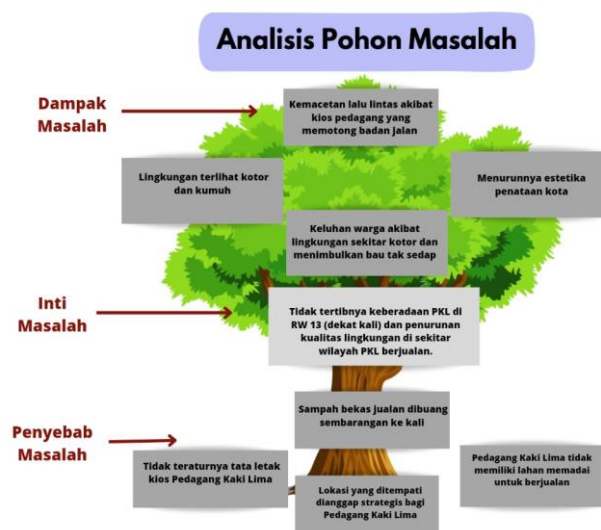
4) Warga yang tinggal di sekitar kawasan PKL mengeluh karena lingkungan kotor akibat sampah berserakan dan kadang menimbulkan bau tak sedap.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka praktikan mengambil fokus masalah yaitu tidak tertibnya keberadaan PKL di RW 13 (dekat kali) dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar wilayah PKL berjualan. Fokus masalah ini diambil berdasarkan hasil asesmen dan peninjauan langsung ke lapangan RW 13.

4) Analisis Pohon Masalah

Berikut merupakan analisis pohon masalah yang dapat digambarkan dari hasil asesmen yang telah dilakukan:



Gambar 15 Analisis Pohon Masalah Penataan Lingkungan

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu:

- 1) Pendekatan advokasi kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan berdiskusi dan mengusulkan rencana program kepada pemerintah Kelurahan Sukapura.
- 2) Membentuk kelompok pedagang kaki lima yang bertujuan sebagai perpanjangan pemerintah Kelurahan Sukapura dalam menertibkan pedagang kaki lima.
- 3) Perlunya inovasi dan modifikasi lingkungan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengurangi tekanan terhadap suatu ekosistem dengan melakukan penertiban dan pengaturan jarak berjualan antar pedagang kaki lima.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut merupakan potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Sukapura:

- 1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung berperan penting dalam bidang penataan, pengelolaan, dan pemberdayaan PKL sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.
- 2) Linmas Kelurahan Sukapura
Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kelurahan Sukapura berperan dalam membantu penertiban para pedagang kaki lima di sekitar lokasi ketika melaksanakan rencana intervensi.
- 3) Ketua RW 13
Ketua RW 13 selaku pemimpin rukun warga disana berperan dalam memerikan informasi kepada pedagang kaki lima dan masyarakat terkait kebijakan dan program penertiban pedagang kaki lima ini



Gambar 16 Sampah di Kali sekitar PKL

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Masalah penataan lingkungan sosial merupakan suatu permasalahan yang sering dialami di masyarakat sekitar. Terlebih di kota-kota besar yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi namun lahan tempat tinggal yang sempit bahkan ada yang berdempetan di dalam gang. Salah satu masalah penataan lingkungan adalah permasalahan lokasi berjualan pedagang kaki lima yang sering menuai pro dan kontra dari masyarakat setempat.

Permasalahan pedagang kaki lima yang sering memanfaatkan tempat umum seperti trotoar dan badan jalan seringkali menciptakan permasalahan baru di lingkungan sekitar mereka berjualan seperti halnya kemacetan hingga lingkungan kumuh karena tata letak kios pedagang yang tidak teratur. Ketidakteraturan pedagang kaki lima ini membuat sebagian warga resah karena mengganggu lalu lintas kendaraan.

Seperti halnya yang terjadi di RW 13 Kelurahan Sukapura, dimana pedagang kaki lima memanfaatkan badan jalan sebagai lokasi untuk berjualan sehingga menyebabkan terganggunya lalu lintas kendaraan akibat posisi kios dan gerobak para pedagang dan motor pembeli yang berhenti untuk membeli dagangan tersebut. Selain itu, keberadaan kios pedagang yang dekat dengan perumahan warga juga menjadi keluhan, karena para pedagang kaki lima disana seringkali membuang sampah bekas dagangan secara sembarangan seperti di kali atau di sekitar badan jalan dekat kios mereka jualan. Sehingga perlu adanya rencana intervensi yang tepat dan efektif melalui pendekatan yang efisien dengan memanfaatkan berbagai sistem sumber yang ada di masyarakat sekitar. Terlebih dalam menertibkan para pedagang kaki lima, perlu adanya tim yang dibentuk dari pedagang tersebut dengan tujuan untuk mempermudah koordinasi antara kelompok pedagang kaki lima dengan pemerintah Kelurahan Sukapura.

b. Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menertibkan pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang badan jalan RW 13 Kelurahan Sukapura dan meningkatkan estetika penataan lingkungan di RW 13. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan pemahaman pedagang kaki lima tentang peraturan lokasi perdagangan di kawasan umum.
- 2) Meningkatkan penataan lingkungan di wilayah pedagang kaki lima berdagang agar nyaman.
- 3) Membentuk paguyuban pedagang kaki lima Kelurahan Sukapura sebagai jalur koordinasi antara kelompok pedagang kaki lima dengan pemerintah Kelurahan Sukapura.
- 4) Membuat tata tertib dan peraturan tertulis terhadap pedagang kaki lima untuk mengurangi terjadinya kemacetan akibat badan jalan yang terpakai oleh kios dan gerobak pedagang serta permasalahan lainnya.

- 5) Mengurangi dampak lingkungan kumuh dan kotor akibat limbah bekas berdagang yang dibuang sembarangan oleh pedagang kaki lima.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi tidak tertibnya keberadaan PKL di RW 13 (dekat kali) dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar wilayah PKL berjualan yaitu berupa pendekatan advokasi kepada Pedagang Kaki Lima serta pembentukan paguyuban pedagang kaki lima Kelurahan Sukapura.

Program yang akan dilaksanakan yaitu “Pembentukan Paguyuban Pedagang Kaki Lima RW 13 Kelurahan Sukapura”.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang terlibat dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Sistem Partisipan Analisis Penataan Lingkungan

No.	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja Sosial
2.	Change Agent System	Pekerja Sosial
3.	Client System	Pedagang Kaki Lima di kawasan RW 13
4.	Support System	1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung 2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung 3. Kelurahan Sukapura
5.	Controlling System	1. Lurah Sukapura 2. Bidang Kesejahteraan Sosial Kelurahan Sukapura 3. Ketua RW 13
6.	Implementing System	1. Pekerja Sosial 2. Linmas Kelurahan Sukapura
7.	Target System	Pedagang Kaki Lima RW 13
8.	Action System	1. Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung 2. Pekerja Sosial 3. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung

e. Metode dan Teknik

Metode yang digunakan praktikan selama melaksanakan proses intervensi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat adalah Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/ Pengembangan Organisasi (*Community Organization/CD*). Pengembangan Masyarakat (*Community Development/CO*)/ Pengembangan Organisasi (*Community Organization/CD*) adalah suatu proses untuk memelihara keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dari suatu masyarakat tertentu atau suatu bidang kegiatan tertentu.

Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

1) *Penyuluhan Sosial*

Penyuluhan sosial adalah sebuah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial, baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna partisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

2) *Focus Group Discussion* atau Diskusi Kelompok Terfokus

Teknik ini berupa diskusi antara beberapa orang untuk membicarakan hal-hal bersifat khusus secara mendalam. Tujuannya untuk memperoleh gambaran terhadap suatu masalah tertentu dengan lebih rinci. Tujuan dari metode itu sendiri adalah untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik.

3) *Capacity Building*

Peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan sasaran terkait ketertiban wilayah pedagang kaki lima di RW 13 Kelurahan Sukapura dengan membentuk paguyuban PKL RW 13 Kelurahan Sukapura.

4) *Monitoring dan Evaluasi*

Monitor merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan baik selama proses kegiatan maupun pada akhir program. Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target.

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Program tidak terbnyta keberadaan PKL di RW 13 (dekat kali) dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar wilayah PKL berjalan dapat dilaksanakan dengan anggaran biaya sebagai berikut:

Tabel 2. 21 Rencana Anggaran Biaya Analisis Penataan Lingkungan

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Logistik				
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Sound System	1	Unit	150.000,00	150.000,00
	Jumlah I				225.000,00
2	Honorarium				
	Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1	Orang/Jam	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah II				1.000.000,00
3	Konsumsi				
	Snack peserta	23	Box	10.000,00	230.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	1	Box	10.000,00	10.000,00
	Jumlah III				320.000,00
	Jumlah Keseluruhan				1.545.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 22 Alat Penataan Lingkungan

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor	1	Buah
Proyektor	1	Buah
Meja narasumber	1	Buah
Meja tamu	1	Buah
Sofa tamu	1	Set
Kursi	23	Buah
ATK	1	Paket
Laptop	1	Buah
Banner kegiatan	1	Buah
Sound system	1	Set
Microfone	1	Buah
Kabel roll (terminal)	2	Buah

g. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak dilaksanakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 2. 23 Analisis SWOT Analisis Penataan Lingkungan

Faktor Internal	Strength: 1) Memiliki indikator keberhasilan yang jelas. 2) Adanya pembentukan paguyuban sebagai perpanjangan tangan Kelurahan Sukapura 3) Output berupa paguyuban PKL yang bertugas membuat tata tertib dan mensosialisasikan ke PKL yang lain.	Weakness: 1) Sulitnya mengajak partisipasi PKL dalam forum sosialisasi
Faktor Eksternal		
Opportunities: 1) Adanya dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder 2) Adanya respon positif dan dukungan dari Ketua RW 13	Strategi SO: 1) Meningkatkan kerjasama dari berbagai pihak 2) Berpacu pada indikator keberhasilan selama pelaksanaan program	Strategi WO: 1) Melibatkan stakeholder dan orang yang berpengaruh dalam mengundang PKL untuk berpartisipasi 2) Melaksanakan kegiatan di waktu yang efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu kegiatan PKL
Threat: 1) Kemungkinan sedikitnya PKL yang hadir dalam sosialisasi	Strategi ST: 1) Melakukan pendekatan yang tepat selama mengajak PKL dalam kegiatan sosialisasi 2) Memberikan motivasi dan inovasi kepada PKL melalui perannya dalam penataan lingkungan sosial yang baik	Strategi WT: 1) Memberikan sosialisasi yang komunikatif dan interaktif sehingga PKL mampu menyampaikan permasalahan dari sudut pandang mereka

Berdasarkan hasil analisis kelayakan program Pembentukan Paguyuban Pedagang Kaki Lima RW 13 Kelurahan Sukapura dengan menggunakan

analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak jika dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat bahwa adanya pembentukan paguyuban PKL ini dianggap lebih mudah untuk berkoordinasi dengan PKL yang lain karena yang menyampaikan informasi merupakan orang yang sama atau setara seperti mereka sehingga pendekatan yang dilakukan mampu diterima.

Kemudian kegiatan ini juga didukung oleh berbagai pihak seperti Pihak Kelurahan Sukapura, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, dan ketua RW 13 Kelurahan Sukapura. Pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung mampu bergerak sebagai edukator dalam hal kebijakan dan peraturan perdagangan bagi wilayah pedagang kaki lima. Hal ini sangat berkaitan dengan permasalahan, tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima dalam memanfaatkan ruang publik tanpa mencemarinya.

Sementara kelemahan kegiatan ini hanya satu yaitu sulitnya mengajak partisipasi pedagang kaki lima dalam kegiatan sosialisasi. Dengan pertimbangan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program Pembentukan Paguyuban Pedagang Kaki Lima RW 13 Kelurahan Sukapura layak dilaksanakan

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

1) Langkah-Langkah Kegiatan

a. Pra Pelaksanaan

- a) Dalam Pembentukan Paguyuban Pedagang Kaki Lima RW 13 Kelurahan Sukapura yang akan dilaksanakan, Praktikan akan mengundang Pihak Kelurahan Sukapura, Ketua RW 13, Pedagang Kaki Lima RW 13, dan Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung selaku narasumber .
- b) Terdapat satu materi yang akan dibawakan dalam kegiatan Sosialisasi ini, yaitu Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah PKL di RW 13.
- c) Narasumber yang menyajikan materi tersebut adalah Perwakilan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
- d) Lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berjalannya kegiatan sosialisasi ini adalah di Aula Kelurahan Sukapura.

b. Pelaksanaan

- a) Sambutan oleh Ketua RW 13 Kelurahan Sukapura.
- b) Sambutan oleh Lurah Kelurahan Sukapura.
- c) Pembacaan Doa oleh Pekerja Sosial.
- d) Pemberian materi tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah PKL di RW 13.
- e) Forum diskusi melalui FGD.

- f) ISHOMA.
 - g) Pembentukan Paguyuban PKL RW 13.
 - h) Penutup.
- c. Pasca Pelaksanaan
- a) Penyusunan Laporan oleh Pekerja Sosial.
 - b) Dokumentasi sebagai Bukti Kegiatan.
 - c) Monitoring dan Evaluasi
- 2) Jadwal Kegiatan
- Berikut merupakan jadwal dan langkah-langkah pelaksanaan program

Tabel 2. 24 Jadwal Kegiatan Analis Penataan Lingkungan

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
1.	09.00-09.05	Pembukaan	Sie Acara	Sambutan Ketua RW 13
2.	09.05-09.10		Sie. Acara	Pembukaan oleh Lurah Sukapura
3.	09.10-09.15	Pembacaan Doa	Sie. Acara	Pekerja sosial
4.	09.15-10.30	Pemberian Materi	Sie. Acara	Materi: Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah PKL di RW 13 Pemateri: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
5.	10.30-11.15	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	Sie. Acara	Tanya Jawab dan Dengar Pendapat PKL
6.	11.15-11.50	Pembentukan Kepengurusan Paguyuban PKL RW 13	Sie. Acara dan Sie. Humas	-
9.	11.50-12.00	Penutup	Sie. Acara	-

i. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari program ini adalah:

- 1) Tercapainya 70% dari jumlah keseluruhan pedagang kaki lima RW 13 Kelurahan Sukapura yang hadir dalam kegiatan sosialisasi.
- 2) Kesepakatan terbentuknya Paguyuban Pedagang Kaki Lima RW 13 yang disetujui oleh Lurah Sukapura dan Ketua RW 13.
- 3) Terbentuknya kepengurusan Paguyuban Pedagang Kaki Lima RW 13 Kelurahan Sukapura.
- 4) Pengurus Paguyuban mampu merancang AD/ART, Tata Tertib bagi pedagang kaki lima, serta kebijakan yang berkaitan dengan penataan lingkungan di kawasan pedagang kaki lima.
- 5) Adanya komitmen dari Paguyuban Pedagang Kaki Lima RW 13 yang bekerjasama dengan Linmas Kelurahan Sukapura dalam penertiban PKL di kawasan RW 13.

E. Profil Analisis Penanggulangan Bencana

1. Gambaran Umum Masalah

Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap bencana masih rendah. Kejadian bencana yang berulang-ulang seharusnya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebencanaan. Di Indonesia sebuah bencana lebih dianggap sebagai takdir Tuhan, sehingga mereka akan pasrah dalam menghadapi bencana. Pada kenyataannya, bencana bisa dicegah dan kemunculannya bisa dideteksi melalui tanda-tanda.

Dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan perlu adanya kolaborasi antar berbagai pihak di wilayah tersebut mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga stakeholder terkait yang bisa membantu dalam hal penanggulangan bencana sehingga penyebab terjadinya bencana mampu diminimalisir.

Ada tiga tahapan program pengurangan resiko bencana yaitu prabencana, pada saat bencana dan pasca bencana dan rehabilitasi. Untuk mengurangi resiko bencana dilakukan berbagai kegiatan yang disebut dengan mitigasi bencana. Mitigasi adalah tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan. Mitigasi sering disebut pencegahan atau pengurangan resiko dan dianggap sebagai landasan manajemen bencana. Ada dua jenis mitigasi bencana yaitu struktural dan non struktural. Mitigasi struktural adalah usaha pengurangan resiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Mitigasi non struktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui modifikasi proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Cara manusia menyesuaikan diri dengan alam, di dalamnya

ada langkah regulasi, program pendidikan dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik non struktural, modifikasi perilaku serta pengendalian lingkungan (Kusumasari, 2014:23).



Gambar 17 Kondisi Aliran Gorong-Gorong RW 10

Wilayah Kelurahan Sukapura merupakan daerah yang memiliki pemukiman penduduk yang cukup padat dan kurangnya lahan dalam pembuatan saluran air limbah sehingga hal ini menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan akibat banyaknya populasi manusia sedangkan ruang yang ada terbatas. Hal ini menyebabkan banyak warga yang tidak memiliki sistem pengolahan air limbah yang memadai dan sesuai dengan ketentuan.

Terlebih di wilayah RT 01 RW 10 Kelurahan Sukapura dimana masyarakat sebagian besar tidak memiliki sistem pengolahan air limbah sehingga air limbah langsung di yang dihasilkan dari rumah tangga langsung dibuang ke kali yang letaknya tak jauh dari rumah warga, selokan kecil yang terletak di dekat gang, bahkan sebagian warga membuang langsung air limbah bekas mencuci langsung ke halaman sekitar. Hal ini diperparah ketika terjadinya hujan yang mampu menyebabkan banjir karena ketidakmampuan tanah untuk menjadi daerah resapan air hujan. Tidak hanya itu, permasalahan banjir di RW 10 juga dikarenakan kurangnya tempat untuk menampung air hujan sehingga ketika hujan lebat banyak rumah yang terdampak banjir.

2. Tinjauan Konsep

a. Definisi Bencana

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat

yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Bencana dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu:

a. Bencana Alam

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

b. Bencana Non Alam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

c. Bencana Sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

b. Manajemen Penanggulangan Bencana

Tyas (2016) dalam Rofifah (2019) menyebutkan bahwa manajemen penanggulangan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana sesuai pada siklus bencana. Siklus bencana dibagi menjadi tiga diantaranya fase pra bencana disebut sebagai fase kesiapsiagaan yang terdiri atas pencegahan dan mitigasi (*prevention and mitigation*), fase bencana disebut sebagai fase tanggap darurat (*response*) yang terdiri atas fase akut (*acute phase*) serta fase sub akut (*sub acute phase*) dan yang terakhir adalah fase pasca bencana atau biasa disebut sebagai fase rekonstruksi yang terdiri dari fase pemulihan atau perbaikan (*recovery phase*) dan fase rehabilitasi atau rekonstruksi (*rehabilitation or reconstruction phase*).

Kesiapsiagaan (*preparedness*) adalah aktivitas serta yang diambil sebelum bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak dari bencana, contohnya berupa memberikan peringatan dini yang tepat dan efektif serta dengan mengevakuasi penduduk dan harta benda dari lokasi yang terancam. Beberapa kegiatan kesiapsiagaan meliputi :

- 1) Peringatan dini Sebagai pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
- 2) Mitigasi (*mitigation*) Langkah struktural dan non struktural yang dilakukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua bagian,

yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif.

Tahap tanggap darurat merupakan tindakan atau pengerahan pertolongan untuk membantu masyarakat atau komunitas yang mengalami bencana, guna mengantisipasi bertambahnya korban jiwa. dari sudut pandang pelayanan medis, bencana terbagi menjadi “fase akut” dan “fase sub akut”. Pada fase akut, 48 jam pertama sejak kejadian bencana dinamakan “fase penyelamatan dan pertolongan/pelayanan medis darurat” kegiatan yang dilakukan adalah penyelamatan dan pertolongan baik berupa tindakan medis darurat terhadap korban luka. Satu minggu setelah terjadinya bencana disebut dengan “fase sub akut” kegiatan yang dilakukan adalah perawatan terhadap orang-orang yang terluka pada saat mengungsi atau dievakuasi, serta dilakukan intervensi terhadap munculnya permasalahan kesehatan selama dalam pengungsian.

Tahap pemulihan berupa tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan kepada kondisi normal. Tahap rekonstruksi merupakan tahap yang bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

c. Bencana Banjir

Banjir di defenisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilaah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi” (IDEP,2007).

“Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir jua dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain” (Ligak, 2008).

d. Jenis-Jenis Banjir

Menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI (2018), banjir dibedakan menjadi lima tipe sebagai berikut:

- 1) Banjir Bandang Banjir yaitu banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan

cukup parah. Banjir bandang biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi di daerah pegunungan.

- 2) Banjir Air Banjir air merupakan jenis banjir yang sangat umum terjadi, biasanya banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau atau selokan. Karena intensitas banyak sehingga air tidak tertampung dan meluap itulah banjir air.
- 3) Banjir Lumpur Banjir lumpur merupakan banjir yang mirip dengan banjir bandang tapi banjir lumpur yaitu banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke daratan. banjir lumpur mengandung bahan yang berbahaya dan bahan gas yang mempengaruhi kesehatan makhluk hidup lainnya.
- 4) Banjir Rob (Banjir Laut Air Pasang) Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Biasanya banjir ini menerjang kawasan di wilayah sekitar pesisir pantai.
- 5) Banjir Cileunang Banjir cileunang mempunyai kemiripan dengan banjir air, tapi banjir cileunang terjadi akibat deras hujan sehingga tidak tertampung.

e. Faktor Penyebab Banjir

Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002), ‘faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir alami dan banjir oleh tindakan manusia. Banjir akibat alami dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Sedangkan banjir akibat aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia yang menyebabkan perubahan-perubahan lingkungan seperti : perubahan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan pemukiman di sekitar bantaran, rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan (vegetasi alami), dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat’

1) Penyebab banjir secara alami

Yang termasuk sebab-sebab alami diantaranya:

- a. Curah hujan
- b. Pengaruh fisiografi
- c. Erosi dan sedimentasi
- d. Kapasitas sungai
- e. Kapasitas drainase yang tidak memadai
- f. Pengaruh air pasang

2) Penyebab banjir akibat aktivitas manusia

Banjir juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia sebagai berikut:

- a. Perubahan kondisi DAS
- b. Kawasan kumuh dan sampah
- c. Drainase perkotaan dan pengembangan pertanian
- d. Kerusakan bangunan pengendali air

- e. Perencanaan sistem pengendalian banjir tidak tepat
- f. Rusaknya hutan (hilangnya vegetasi alam)

3. Asesmen

a. Identifikasi Masalah

Bencana banjir merupakan permasalahan yang seringkali terjadi di wilayah perkotaan. Terlebih di wilayah perkotaan banyak daerah resapan air yang dirampas untuk membangun wilayah permukiman penduduk dan infrastruktur untuk menunjang pembangunan. Banyak masyarakat perkotaan yang menganggap sepele permasalahan banjir ini, karena dianggap merupakan masalah yang selalu terjadi setiap musim hujan sehingga mereka hanya pasrah dengan keadaan dan kurang tanggap dalam melakukan pencegahan dan mitigasi bencana.



Gambar 18 Wawancara Bersama Ketua RW 10

Seperti halnya yang terjadi di RW 10 Kelurahan Sukapura yang seringkali menjadi pusat terjadinya banjir di beberapa wilayahnya seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 25 Identifikasi Masalah Analisis Penanggulangan Bencana

Nama Wilayah	Keterangan
RT 1	Tidak adanya SPAL, Saluran air/got yang kecil dan sempit, wilayah dekat dengan sungai/kali, terdapat biopori namun rusak.
RT 2	Jarang terjadi banjir, sudah memiliki sumur resapan.
RT 3	Saluran air/got yang kecil dan sering tersumbat oleh sampah, wilayah lebih rendah dari badan jalan sehingga air mudah menggenang, terdapat biopori namun rusak.
RT 4	Saluran air/got kecil dan tersumbat sampah, sudah terdapat sumur resapan,
RT 5	Jarang terjadi banjir, memiliki gorong-gorong yang memadai, memiliki biopori namun rusak.

Dari hasil melakukan praktik MPA dan wawancara ke beberapa warga di setiap RT yang dilaksanakan pada 17 Maret 2023 disimpulkan bahwa penyebab utama banjir di wilayah RW 10 tersebut terjadi ketika hujan. Hal

ini lahan yang dimiliki tidak memadai untuk menampung air hujan. Terlebih hanya sebagian warga yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bertujuan untuk mengurangi banjir sehingga hal ini memperparah keadaan ketika hujan tiba.

Selain dari faktor eksternal seperti kurangnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sampah yang menumpuk di selokan, selokan yang sempit. Banjir juga terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar serta kurangnya pemahaman dalam mitigasi bencana banjir sehingga banyak dari mereka yang hanya pasrah ketika terjadi banjir di musim hujan.



Gambar 19 Pelaksanaan MPA di RW 10

1) Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka penyebab masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan GPS

Gerakan Pungut Sampah merupakan salah satu program ketua RW 10 yang bertujuan untuk membersihkan lingkungan dari sampah khususnya di selokan yang menjadi saluran jalannya air limbah. Namun, ketika pelaksanaannya, masih banyak masyarakat yang kurang antusias dalam menjalankan program ini.

2) Seluruh Saluran Biopori rusak

Saluran Biopori ini merupakan program Kelurahan Sukapura yang direalisasikan di setiap RW yang rawan banjir, tujuannya untuk menampung dan menyerap air hujan yang menggenang dan melakukan filtrasi terhadap sampah yang terbawa air hujan terserap ke lubang biopori untuk selanjutnya di olah menjadi pupuk. Namun, lubang biopori ini tidak dirawat dengan baik, sehingga 25 lubang biopori di RW 10 rusak akibat tersumbat tanah dan kotoran dan tidak ada biaya untuk memperbaikinya kembali.

3) Masyarakat belum memahami manfaat IPAL

Instalasi Pengolahan Air Limbah merupakan bentuk sanitasi air limbah rumah tangga yang dihasilkan sebelum dibuang ke sungai atau sumber akhir. Namun, banyak warga yang tidak memiliki IPAL di rumahnya sehingga air limbah rumah tangga langsung disalurkan ke sungai dan menyebabkan sungai menjadi kotor dan berpotensi menjadi sarang penyakit.

4) Masyarakat membuang sampah ke sungai

Masih banyak masyarakat di RW 10 yang membuang sampah rumah tangga ke sungai/kali di dekat wilayah RW 10 sehingga sampah yang menumpuk mempengaruhi kualitas air dan penyerapan air jadi tidak maksimal, sehingga ketika hujan sungai meluap dan terjadilah banjir.

5) Masyarakat menganggap masalah banjir sebagai sebuah masalah yang biasa terjadi sehingga mereka hanya pasraha ketika banjir terjadi dan kurang tanggap dalam melakukan mitigasi.

2) Dampak Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka dampak masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1) Sampah menumpuk di selokan dan sungai

Akibat perilaku warga yang membuang sampah sembarangan ke selokan dan sungai sehingga menyebabkan sampah menumpuk yang berpotensi menjadi dampak terjadinya banjir.

2) Air hujan menggenang

Air hujan menggenang akibat selokan yang tersumbat dengan sampah dan tidak memadai untuk menampung dan mengalirkan air hujan, terutama di wilayah gang sehingga air hujan mudah menggenang sehingga menyebabkan banjir.

3) Masyarakat membuang air limbah ke sungai

Tidak adanya IPAL mendorong masyarakat untuk membuang air limbah rumah tangga ke sungai sehingga kualitas air sungai menurun dan menyebabkan permasalahan baru seperti banjir dan masalah kesehatan.

4) Terjadinya banjir akibat kurangnya wilayah resapan air

Kurangnya daerah resapan air akibat biopori yang rusak. Meskipun sudah ada sumur resapan, namun belum mampu untuk menjangkau setiap wilayah yang terjadi banjir.

5) Penanggulangan dan mitigasi banjir kurang optimal

Karena kurangnya pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mitigasi bencana banjir menyebabkan penanggulangan bencana banjir kurang optimal dan selalu dianggap masalah sepele setiap tahunnya.

3) Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada maka praktikan mengambil fokus masalah yaitu kurangnya peran dan inovasi masyarakat RW

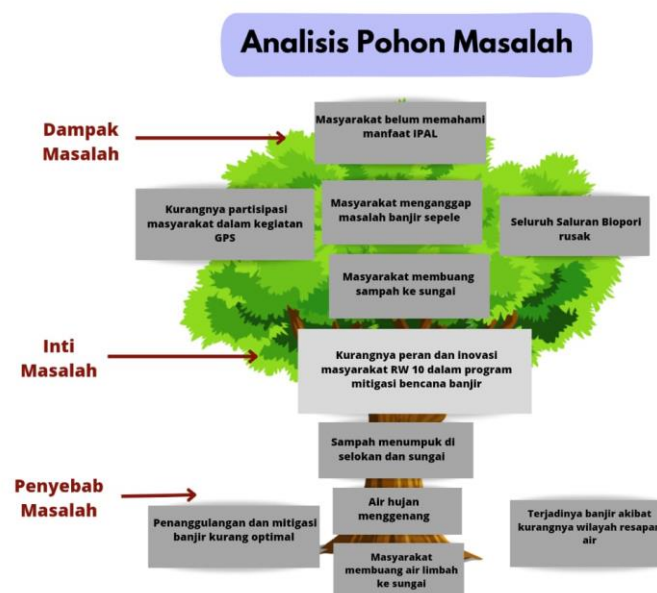
10 dalam program mitigasi bencana banjir. Fokus masalah ini diambil berdasarkan hasil asesmen dan wawancara bersama informan di RW 10.

4) Analisis Pohon Masalah

Berikut merupakan analisis pohon masalah yang dapat digambarkan dari hasil asesmen yang telah dilakukan:

b. Identifikasi Kebutuhan

Berdasarkan penyebab dan dampak permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi kebutuhan yang diperlukan yaitu:



*Gambar 20 Analisis Pohon Masalah
Penanggulangan Bencana*

- 1) Sosialisasi kepada warga RW 10 terkait pentingnya pengadaan IPAL untuk mencegah terjadinya bencana banjir di wilayah RW 10.
- 2) Sosialisasi terkait pentingnya program mitigasi bencana banjir dalam mengurangi dampak terjadinya bencana banjir terlebih ketika musim hujan.
- 3) Pendampingan kepada masyarakat dalam melaksanakan program mitigasi bencana seperti pengolahan sampah dan pembuatan lubang biopori dalam upaya pencegahan banjir ketika musim hujan.
- 4) Larangan tegas untuk tidak membuang sampah ke sungai yang akan menyumbat penyerapan air.

c. Identifikasi Potensi dan Sumber

Berikut merupakan potensi dan sumber yang ada di Kelurahan Sukapura:

- 1) Kelompok Gober Kelurahan Sukapura
Kelompok Gober merupakan tim yang dibentuk oleh Kelurahan Sukapura dalam menangani permasalahan sampah. Dalam rencana

- intervensi, kelompok gober berperan dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam pemilahan sampah yang baik.
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung
Dalam pelaksanaan Rencana Intervensi, BPBD Kab. Bandung Barat berperan sebagai pelaksana kebijakan mitigasi. BPBD juga berperan sebagai educator terhadap masyarakat tentang pentingnya Mitigasi Bencana.
 - 3) Kelompok PKK RW 10
Kelompok PKK RW 10 dalam rencana intervensi berperan sebagai motivator dalam mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam meningkatkan perannya untuk menanggulangi terjadinya banjir seperti giat dalam kegiatan gerakan pungut sampah yang dilaksanakan setiap minggunya.
 - 4) Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Tagana mempunyai peran untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana serta berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya bencana. Sehingga dalam pelaksanaan rencana intervensi ini, tagana dapat berperan sebagai fasilitator dan edukator.
 - 5) Kelompok Pepelingasih Kota Bandung
Kelompok Pepelingasih dalam rencana intervensi berperan sebagai *partnership* dalam kolaborasi untuk menciptakan inovasi program dalam penanggulangan bencana banjir di RW 10 Kelurahan Sukapura.
 - 6) Tokoh Masyarakat
Sebagai Tokoh Masyarakat, dalam pelaksanaan Rencana Intervensi, Tokoh Masyarakat dapat berperan sebagai fasilitator dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Tokoh Masyarakat juga berperan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana agar program yang dilakukan berjalan dengan baik.

4. Rencana Intervensi

a. Latar Belakang

Terjadinya bencana banjir di setiap tahunnya tentu menjadi problematika yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan. Hal ini dikarenakan kurangnya daerah resapan air akibat pembangunan infrastruktur dan pemukiman penduduk, sehingga perlu adanya upaya penanggulangan bencana yang tepat dalam mengatasi bencana banjir ini.

Dalam penanggulangan bencana yang dilaksanakan perlu adanya kolaborasi antar berbagai pihak di wilayah tersebut mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga stakeholder terkait yang bisa membantu dalam hal penanggulangan bencana sehingga penyebab terjadinya bencana mampu diminimalisir. Ada tiga tahapan program pengurangan resiko bencana yaitu prabencana, pada saat bencana dan pasca bencana dan rehabilitasi. Untuk

mengurangi resiko bencana dilakukan berbagai kegiatan yang disebut dengan mitigasi bencana.

Mitigasi bencana merupakan suatu kegiatan yang penting untuk dilaksanakan, namun faktanya yang terjadi RW 10 Kelurahan Sukapura banyak masyarakat yang masih belum memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi pencegahan bencana banjir di wilayahnya. Sehingga kegiatan tidak berjalan optimal akibat kurangnya partisipasi dan inovasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.

Meskipun berbagai program sudah diluncurkan dari pihak pemerintah kabupaten, namun hal utama dalam mensukseskan program mitigasi bencana yaitu masyarakat di wilayah itu sendiri. Maka penting sekali peran dan partisipasi masyarakat dalam membuat inovasi dan berkomitmen agar tidak menganggap sepele bencana banjir ini. Karena apabila dibiarkan dan dianggap sepele maka akan berdampak besar bagi masyarakat kedepannya.

b. Tujuan Umum dan Khusus

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat RW 10 Kelurahan Sukapura dalam urgensi pelaksanaan program mitigasi bencana banjir.

Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini, antara lain:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang urgensi program mitigasi bencana.
- 2) Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat IPAL dalam mengolah limbah rumah tangga.
- 3) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Pungut Sampah (GPS).
- 4) Mencegah dan mengurangi perilaku masyarakat yang sering membuang sampah ke sungai dan selokan.
- 5) Mengajukan perbaikan gorong-gorong dan saluran biopori ke dalam program PIPPK melalui Kelurahan Sukapura.

c. Bentuk Kegiatan dan Program

Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk mengatasi kurangnya peran dan inovasi masyarakat RW 10 dalam program mitigasi bencana banjir yaitu berupa sosialisasi tentang pentingnya mitigasi bencana serta pelatihan kegiatan mitigasi bencana melalui pembuatan kebijakan.

Program yang akan dilaksanakan yaitu “Masyarakat Tanggap Bencana”.

d. Sistem Partisipan

Sistem partisipan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan intervensi yaitu:

Tabel 2. 26 Sistem Partisipan Analisis Penanggulangan Bencana

No	Jenis Sistem	Sistem Representatif
1.	Initiator System	Pekerja Sosial Masyarakat
2.	Change Agent System	1. Pekerja Sosial Masyarakat 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bandung Barat 3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
3.	Client System	1. Warga RW 10 Kelurahan Sukapura
4.	Support System	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung 2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 3. Pemerintah Kelurahan Sukapura
5.	Controlling System	1. Pekerja Sosial Masyarakat 2. Aparatur Kelurahan Sukapura 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung
6.	Implementing System	1. Pekerja Sosial Masyarakat 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung 3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 4. Kelompok Peplingasih
7.	Target System	1. Warga RW 10 Kelurahan Sukapura
8.	Action System	1. Pekerja Sosial Masyarakat 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung 3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

e. Metode dan Teknik

Metode utama yang dilakukan adalah bimbingan sosial masyarakat atau “*Community Organization/Community Development (CO/CD)*”, yang bertujuan supaya sasaran dalam hal ini Warga RW 10 Kelurahan Sukapura mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, memanfaatkan potensi sumber di lingkungannya, dan mengorganisir kegiatan-kegiatan kemasyarakatannya. Beberapa teknik yang digunakan praktikan antara lain:

1) *Community Development*

Praktikan memilih menggunakan metode *Community Organization/Community Development (CO/CD)* karena pengorganisasi masyarakatan (CO) diartikan sebagai suatu proses intervensi yang dilakukan oleh pekerja sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui usaha bersama yang terencana. Sedangkan pengembangan masyarakat (CD) merupakan upaya yang dilakukan oleh profesional dan penduduk setempat untuk meningkatkan ikatan sosial diantara anggota masyarakat, meningkatkan motivasi warga masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri.

2) *Capacity Building*

Peningkatan kapasitas pengetahuan sasaran terkait pengelolaan air limbah dan segala macam administrasi yang diperlukan oleh pelaku usaha industri tahu serta seksi pemerintahan desa Lembang dengan

melaksanakan kelas praktik, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi bersama *stakeholder* terkait.

3) Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial adalah suatu proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi, komunikasi, motivasi, dan edukasi oleh Penyuluh Sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemauan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

4) Monitoring dan Evaluasi

Monitor merupakan kegiatan pemantauan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan atau perubahan yang terjadi di masyarakat sebagai dampak kegiatan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan baik selama proses kegiatan maupun pada akhir program. Tujuan Monitoring dan Evaluasi adalah umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target

f. Rencana Anggaran Biaya dan Alat yang Dibutuhkan

Program peningkatan kapasitas “Masyarakat Tanggap Bencana” dapat terlaksana dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 27 Rencana Anggaran Biaya Analisis Penanggulangan Bencana

No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Logistik				
	ATK	2	Paket	100.000,00	200.000,00
	Sewa tenda	1	Paket	700.000,00	700.000,00
	Sewa kursi	90	orang	5.000,00	450.000,00
	Sound System	2	Unit	0	0
	Banner kegiatan Penyuluhan Sosial	1	Lembar	75.000,00	75.000,00
	Doorprize	3	Unit	50.000,00	150.000,00
	Proyektor	1	Unit	0	0
	Layar Proyektor	1	Unit	0	0
	Jumlah I				1.575.000,00
2.	Honorarium				
	Pekerja Sosial Masyarakat	2	Orang/Jam	150.000,00	300.000,00
	BPBD	1	Orang/Jam	0	0
	TAGANA	5	Orang/Hari	100.000,00	500.000,00
	Jumlah II				1.000.000,00
3.	Konsumsi				
	Snack peserta	80	Box	10.000,00	800.000,00
	Snack panitia	8	Box	10.000,00	80.000,00
	Snack narasumber	7	Box	10.000,00	70.000,00
	Snack tamu undangan	5	Box	10.000,00	50.000,00
	Jumlah III				1.000.000,00
	Jumlah Keseluruhan				3.575.000,00

Adapun alat yang diperlukan dalam pelaksanaan rencana intervensi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 28 Alat Analis Penanggulangan Bencana

Nama Keperluan	Volume	Satuan
Layar proyektor	1	Buah
Proyektor	1	Buah
Meja narasumber	1	Buah
Meja tamu	2	Buah
Sofa tamu	2	Set
Kursi	90	Buah
ATK	2	Paket
Laptop	1	Buah
Banner kegiatan	1	Buah
Sound system	1	Set
Microfone	2	Buah
Kabel roll (terminal)	3	Buah
Tenda	1	Paket

g. Analisis Kelayakan Program

Program ini layak dilaksanakan berdasarkan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Analisis SWOT Analisis Penanggulangan Bencana

Faktor Internal	<p>Strength:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedianya sumber daya pelaksana yang memadai 2) Kegiatan didukung oleh BPBD Kota Bandung dan tim TAGANA 3) Adanya kelompok Peelingasih sebagai sukarelawan dalam bidang penanggulangan bencana 4) Tokoh masyarakat berpartisipasi aktif 	<p>Weakness:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Masyarakat di RW 10 Kelurahan Sukapura hanya sedikit yang tertarik dalam program sosialisasi mitigasi bencana
Faktor Eksternal		
<p>Opportunities:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder 2) Warga RW 10 Kelurahan Sukapura memiliki kemampuan mitigasi bencana 3) Mengurangi risiko kerentanan ketika bencana terjadi 4) Adanya pemetaan kawasan rawan bencana banjir 5) Mengurangi kemungkinan kerugian fisik dan materi 	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan kerjasama dengan BPBD, TAGANA, dan Kelompok Peelingasih Kota Bandung 2) Tokoh masyarakat sebagai figur untuk mengajak partisipasi aktif masyarakat 3) Membuat wadah informasi yang dapat diakses semua warga 4) Merangkul praktisi atau akademisi untuk membantu dalam pemetaan wilayah rawan bencana banjir 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan simulasi tanggap bencana 2) Menjadikan pemetaan kawasan rawan bencana menjadi program prioritas Kelurahan Sukapura
<p>Threat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kelompok siaga bencana di Kelurahan Sukapura yang telah dibentuk tidak aktif dan efektif 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melibatkan tokoh masyarakat dalam kelompok siaga bencana 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan sosialisasi yang komunikatif agar mampu dipahami oleh masyarakat 2) Membentuk struktur kelompok TAGANA baru

Berdasarkan hasil analisis kelayakan Program Masyarakat Tanggap Bencana dengan menggunakan analisis SWOT dapat diketahui bahwa aspek kekuatan lebih banyak dibandingkan dengan aspek kelemahan. Dapat dilihat dari kegiatan yang di dukung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagai edukator serta fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nantinya masyarakat akan mendapatkan pengetahuan mengenai mitigasi bencana banjir.

Selain itu adanya Kelompok Pepelingsih yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dapat berkontribusi sebagai wadah komunikasi dan penggerak dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya mitigasi bencana dan menjaga keseimbangan lingkungan.

Sementara itu, ancaman pelaksanaan kegiatan ini hanya satu, yaitu kemungkinan Kelompok Siaga Bencana yang telah dibentuk tidak aktif dan efektif. maka dapat disimpulkan bahwa program pengembangan kapasitas Masyarakat Tanggap Bencana layak dilaksanakan

h. Jadwal dan Langkah-Langkah

Langkah-langkah pelaksanaan program pengembangan kapasitas “Masyarakat Tanggap Bencana” adalah sebagai berikut:

- a. Pra Pelaksanaan
 - 1) Praktikan akan mengundang Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bandung, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lurah Kelurahan Sukapura, Pekerja Sosial Masyarakat, Ketua RW 10, Kelompok PKK, dan Masyarakat RW 10 Kelurahan Sukapura.
 - 2) Menyusun *Term of Reference* (ToR) yang berisikan *rundown* acara dan materi yang akan diserahkan ke narasumber.
 - 3) Menghubungi narasumber yang akan mengisi materi yaitu Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Bandung dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kecamatan Kiaracandong.
 - 4) Lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan adalah Lapangan RW 10 Kelurahan Sukapura
- b. Pelaksanaan
 - 1) Sambutan oleh Ketua RW 10 Kelurahan Sukapura.
 - 2) Pembukaan acara oleh Lurah Kelurahan Sukapura.
 - 3) Pemberian materi tentang Bencana Banjir dan Mitigasi Bencana sebagai Manajemen Risiko Penanggulangan Bencana.
 - 4) Praktik simulasi bencana banjir dan pembuatan Kelompok Siaga Bencana.
 - 5) Penutup.
- c. Pasca Pelaksanaan
 - 1) Pendampingan
 - 2) Pemetaan wilayah rawan bencana banjir di RW 10 Kelurahan Sukapura

3) Dokumentasi sebagai bukti kegiatan

Tabel 2. 30 Jadwal Kegiatan Analis Penanggulangan Bencana

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
Hari ke-1				
1.	09.00-09.10	Pembukaan	Sie. Acara	Pembukaan oleh <i>Master of Ceremony</i>
2.	09.10-09.25	Sambutan	Sie. Acara	Sambutan oleh Ketua RW 10
3.	09.25-09.30	Sambutan dan Pembukaan Kegiatan secara resmi	Sie. Acara	Lurah Kelurahan Sukapura
4.	09.30-11.30	Pemberian Materi 1	Sie. Humas dan Sie Acara	Materi : Bencana Banjir dan Mitigasi Bencana sebagai Manajemen Risiko Penanggulangan Bencana. Pemateri : Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Hari Ke-2				
1.	09.00-11.00	Praktik	Sie. Humas	Simulasi Bencana Banjir oleh BPBD dan TAGANA
2.	11.00-11.30	Pembentukan Kelompok Siaga Bencana	Sie. Humas	Dikoordinir dengan pekerja sosial masyarakat
3.	11.30-11.45	Pengarahan	Sie. Acara	Pemberian arahan kepada Kelompok Siaga Bencana yang baru terbentuk
4.	11.45 – 12.00	penutupan	Sie. Acara	-

i. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari program ini adalah:

- 1) Peningkatan manajemen risiko penanggulangan bencana pada warga RW 10 Kelurahan Sukapura.
- 2) Adanya peta rawan bencana banjir di Kelurahan Sukapura.
- 3) Terciptanya jalur evakuasi sebagai upaya mitigasi bencana.
- 4) Terbentuknya Kelompok Siaga Bencana Kelurahan Sukapura.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kegiatan praktikum Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang telah terlaksana yaitu Analisis Jaminan Sosial, Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, Analisis Pemberdayaan Sosial, Analisis Penataan Lingkungan Sosial, dan Analisis Penanggulangan Bencana. Dari pelaksanaan kegiatan praktikum ini, mahasiswa memperoleh pengalaman praktik dengan pengumpulan data melalui data sekunder di Kelurahan Sukapura. Pengumpulan data tersebut mahasiswa lakukan ketika mencari data terkait isu-isu profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

1. Analisis Jaminan Sosial

Dalam profil Analisis Jaminan Sosial, praktikan memilih isu masalah mengenai Program Bantuan Iuran Kartu Indonesia Sehat (PBI KIS) di RW 03 Kelurahan Sukapura yang di dalam penyelenggaraannya terdapat kendala dimana masyarakat miskin khususnya masyarakat lanjut usia dan ibu rumah tangga yang tergolong fakir miskin memiliki PBI KIS yang tidak aktif bahkan sebagian masyarakat ada yang tidak memiliki kartu PBI KIS sehingga hal ini mengakibatkan kelompok penerima manfaat tersebut tidak dapat mengakses layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit karena tidak terdaftar dalam tanggungan BPJS Kesehatan. Dalam upaya pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program “Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Kartu PBI KIS dalam Optimalisasi Pelayanan Kesehatan” dengan target sasaran masyarakat miskin di RW 03 Kelurahan Sukapura.

2. Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam profil Analisis Sumber Dana Bantuan Sosial, praktikan memilih isu mengenai penyelewengan dana Program Dana Sehat oleh ketua posyandu periode sebelumnya di RW 05 Kelurahan Sukapura, hal ini memberikan dampak dana yang terkumpul tidak sampai ke pihak posyandu dan program pemberian makanan tambahan terhambat. Dalam upaya pemecahan permasalahan ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui “Workshop Cerdas Pengelolaan Dana Posyandu dalam Mendukung Program PMT”

3. Analisis Pemberdayaan Sosial

Dalam profil Analisis Pemberdayaan Sosial, praktikan memilih isu mengenai kurangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat di RW 10 Kelurahan Sukapura dalam Program Kang Pisman sehingga program tidak berjalan maksimal, hal ini berdampak pada program

yang awalnya berjalan jadi terhenti karena kurangnya sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Dalam upaya pemecahan masalah tersebut, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui “Workshop CERMAT (Cerdas Mengelola Sampah menjadi Produk Bermanfaat)”.

4. **Analisis Penataan Lingkungan Sosial**

Dalam profil Analisis Penataan Lingkungan Sosial, praktikan memilih isu mengenai tidak tertibnya keberadaan pedagang kaki lima di RW 13 dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar wilayah pedagang kaki lima, hal ini menimbulkan dampak lingkungan terlihat kumuh dan air sungai/kali tercemar oleh sampah bekas jualan pedagang kaki lima. Dalam upaya pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program “Pembentukan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kelurahan Sukapura”.

5. **Analisis Penanggulangan Bencana**

Dalam profil Analisis Penanggulangan Bencana, praktikan memilih isu mengenai kurangnya peran dan inovasi masyarakat RW 10 dalam program mitigasi bencana banjir, hal ini berdampak air menggenang terlebih musim hujan sehingga berpotensi terjadinya banjir, terlebih masyarakat tidak memiliki persiapan dalam menghadapi bencana banjir, serta belum terbentuknya kelompok siaga bencana di wilayah tersebut. Dalam upaya pemecahan masalah ini, praktikan merumuskan rencana intervensi melalui program “Masyarakat Tanggap Bencana”.

Secara garis besar, manfaat lain yang mahasiswa dapatkan dari kegiatan praktikum ini yaitu kemampuan menganalisis masalah yang dimiliki mahasiswa meningkat. Mahasiswa juga mendapat pengetahuan-pengetahuan baru terkait profil lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial yang belum di dapat di bangku perkuliahan. Oleh karena itu, mahasiswa dapat mengetahui lebih dalam dan luas tentang dunia kerja profesi Pekerja Sosial. Sehingga nantinya mahasiswa termotivasi dan yakin akan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi Pekerja Sosial yang dimiliki.

B. Rekomendasi

1. **Untuk Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial**

- a. Diharapkan dapat bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar pengalaman dan keterampilan mahasiswa dapat lebih berkembang.
- b. Mengundang narasumber yang ekspert di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial agar mahasiswa mengetahui peluang kerja

yang sesuai dengan lulusan Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

- c. Memberikan supervisi yang mampu membangun pemahaman dan kompetensi mahasiswa dalam praktiknya di lapangan.
2. Untuk Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung
 - a. Diharapkan dapat menerbitkan Pedoman Praktikum Laboratorium yang tetap dan tidak berubah-ubah, agar mahasiswa mendapatkan acuan yang jelas terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaan di lapangan.
 - b. Mendukung mahasiswa dalam aktif di lapangan dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, L. (2022). Simak Penjelasan Lengkap dengan Cek Nama Penerima Bansos di Sini. *Pikiran Rakyat Depok.com*.
- Budiman, B. (2010). Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. *Doctoral dissertation*.
- Dori, S. A. (2020). Identifikasi Wilayah Rawan Genangan Banjir, Penyebab dan Upaya Penanggulangannya di Nagari Campago Kabupaten Padang Pariaman. *Diploma thesis, Universitas Andalas*.
- Flora, M. (2022). Syarat dan Cara Cek Daftar Penerimaannya. *Liputan 6.com*.
- Gunawan, I. (2019). Sistem Pemerintahan. *Jurnal UNIKOM*.
- Habibullah. (2017). Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 3.1.
- Harahap, R. H. (2018). Implementasi Dana Hibah Dan Bansos Berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Terhadap Transparansi Penyerapan Anggaran Hibah Dan Bantuan Sosial Di Kota Pontianak. *Jurnal Untan*.
- Jabar, D. (2020). Jumlah Penerima Jaminan Kesehatan Penduduk Berdasarkan Jenis Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Barat. *Jumlah Penerima Jaminan Kesehatan Penduduk Berdasarkan Jenis Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Jawa Barat*.
- Kesehatan, B. (2020). Panduan Layanan Bagi Peserta JKN-KIS. Diakses pada 17 Februari 2023, Pukul 20.35 WIB
- M. J. Maspaitella, N. R. (2014). PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENDEKATAN PEKERJA SOSIAL. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*.
- Majid, R. A. (2022). Syarat untuk Mendapatkan, Fungsi dan Pencairan PBI. *Kompas TV*. Diakses pada 20 Februari 2023, Pukul 18.35 WIB
- Nani, S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Kegiatan Posyandu. *Lifelong Educational Journal*.
- Purba, J. (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

RI, K. (2020). Buku Pegangan Sosialisasi. *BPJS Kesehatan*. Diakses pada 20 Februari 2023, Pukul 22.34 WIB

Ridwan, E. (2022). Syarat dan Cara Cek Penerima PBI JK. *Detik Sulsel*. Diakses pada 20 Februari 2023, Pukul 22.58 WIB

LAMPIRAN



Gambar 21 Koordinasi dengan Pihak Kelurahan Sukapura



Gambar 22 Kunjungan ke Posyandu RW 05



Gambar 23 Wawancara kepada Ketua RW 03



Gambar 24 Wawancara dengan Ibu PKK RW 10



Gambar 25 Kondisi air got di RW 10



Gambar 26 Wawancara dengan Ketua Gober Sukapura